



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALITBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat 10110



**REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019**

KATA PENGANTAR

Dokumen Tinjau Ulang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2015 -2019 merupakan penyempurnaan dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015 -2019.

Tinjau ulang dokumen renstra ini disusun sebagai tindak lanjut terhadap perubahan arah kebijakan dan program strategis pemerintah. Pada tahun 2018 dilakukan reviu terhadap Renstra Kementerian Perhubungan yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Litbang Perhubungan sebagai bagian integral dari Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja penunjang juga mengakomodir perubahan tersebut dengan melaksanakan reviu Renstra.

Jakarta, 5 September 2019

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN



SUGIHARDJO

Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610224 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Prioritas dan Arah Pembangunan Sektor Transportasi	7
1.3 Perubahan Lingkungan Strategis	11
1.4 Maksud dan Tujuan	13
1.5 Ruang Lingkup	13
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
2.1 Visi dan Misi Presiden	14
2.2 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita)	14
2.3 Tugas Pokok, Fungsi, Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perhubungan	15
2.4 Tugas Pokok, Fungsi, Visi, Misi dan Tujuan Badan Litbang Perhubungan 2015-2019.....	22
2.5 Program dan Kegiatan Badan Litbang Perhubungan	25
BAB III CAPAIAN RENCANA STRATEGIS BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2015 - 2018	26
3.1 Hasil Penelitian Transportasi 2015 – 2018	26
3.2 Realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	46
3.3 Realisasi Kinerja Keuangan Badan Litbang Perhubungan 2015 - 2018	53
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	54
4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Transportasi	54
4.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Transportasi Nasional	54
4.1.2 Agenda Riset Nasional.....	55
4.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan	56
4.1.4 Arah Kebijakan Badan Litbang Perhubungan	61
4.2 Peran dan Fokus Kegiatan Badan Litbang Perhubungan	63
4.2.1 Optimalisasi Peran Badan Litbang Perhubungan 2015 - 2019.....	63
4.2.2 Fokus Kegiatan Badan Litbang Perhubungan 2015 – 2019	66

4.3	Strategi Badan Litbang Perhubungan 2015 - 2019	68
4.4	Kerangka Regulasi	70
BAB V	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	72
5.1	Target Kinerja.....	72
5.2	Kerangka Pendanaan Badan Litbang Perhubungan 2015-2019.....	72
LAMPIRAN I	74
LAMPIRAN II	76
LAMPIRAN III	77
LAMPIRAN IV	78
LAMPIRAN V	79
LAMPIRAN VI	80
LAMPIRAN VII	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015 – 2019	8
Tabel 2.1	Konektivitas Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Badan Litbang Perhubungan 2015 - 2019	24
Tabel 2.2	Pemetaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015 - 2019	25
Tabel 3.1	Hasil Penelitian Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015 - 2018.....	26
Tabel 3.2	Perkembangan Peserta Tugas Belajar	46
Tabel 3.3	Perkembangan Peserta Diklat Teknis Jabatan Fungsional Peneliti	46
Tabel 3.4	Perkembangan Peserta Kursus, Training/ <i>Workshop</i> Dalam dan Luar Negeri Tahun 2015-2018	47
Tabel 3.5	Kegiatan Seminar/ <i>Workshop/Roundtable Discussion</i> <i>/Focus Group Discussion/</i> Temu Karya Peneliti.....	49
Tabel 3.6	Target Anggaran dan Capaian Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015 - 2019	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Strategis Kementerian Perhubungan.....	19
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 yang telah berlaku efektif sejak tahun 2015. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan tersebut melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor KP. 228 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2015 - 2019 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 24 November 2015. Namun menindaklanjuti hasil reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 serta hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian PAN-RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan perlu dilakukan perbaikan (reviu) atas RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tersebut. Perbaikan tersebut terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya berbasis *output* menjadi berbasis *outcome*.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan sebagai bagian integral dari Kementerian Perhubungan merupakan lembaga penunjang, sebagaimana isi pasal 28 Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Badan Litbang Perhubungan bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan dan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai *policy research* di bidang perhubungan mempunyai peranan penting guna menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan dalam upaya terwujudnya pelayanan jasa transportasi.

Untuk mendukung tugas tersebut Badan Litbang Perhubungan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Perhubungan, koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Badan Litbang, koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, pemberian pelayanan informasi di bidang penelitian dan pengembangan, evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Litbang Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, Renstra menjadi tolak ukur penting dari suatu mekanisme sistem akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tahunan harus tetap mengacu pada rencana strategik dan pada akhirnya setiap pelaksanaan pembangunan menjadi suatu perencanaan yang sistematis dan terukur. Penyusunan dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, serta berkelanjutan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kedudukan Renstra sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan menuju suatu sistem pembangunan penelitian dan pengembangan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan. Dari kegiatan penyusunan renstra, berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi diharapkan dapat teratasi melalui pencermatan pada lingkungan strategis untuk selanjutnya dapat disusun ke dalam prioritas pembangunan penelitian dan pengembangan.

Renstra Badan Litbang Perhubungan merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada PERMEN Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, Rencana Jangka Panjang Perhubungan 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019. Dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan 2015-2019 disusun sebagai panduan dan arahan bagi Unit Kerja dan Jajaran Birokrat di lingkup Badan Litbang Perhubungan dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan perhubungan periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub-sektor terkait.

1.2. PRIORITAS DAN ARAH PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI

Sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, penyediaan infrastruktur transportasi diprioritaskan untuk menjamin kelancaran aksesibilitas bagi masyarakat dengan tingkat pelayanan optimal serta harga yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang dan jasa, salah satunya yaitu melakukan penataan sistem logistik nasional. Selain itu, upaya lain yang dilakukan melalui pembenahan penanganan arus barang di pelabuhan

termasuk proses intermoda antara angkutan laut dengan moda lainnya dengan tetap memperhatikan/ pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang ada saat ini, sesuai RPJMN 2015-2019 prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

Tabel 1.1 Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan		
1.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	<ul style="list-style-type: none"> a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama; b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru; c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara; d) Peningkatan <i>On-Time Performance</i> Penerbangan menjadi 95%; e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran; f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan <i>feeder</i>; g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub <i>feeder</i> tol laut; h) <i>Dwelling Time</i> pelabuhan; i) Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayannya 193 lintas angkutan laut perintis; j) Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer;

NO	SASARAN	INDIKATOR
		<p>k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros-poros penghubungnya melalui pembangunan/ pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan;</p> <p>l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.</p>
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global	<p>a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal;</p> <p>b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat;</p> <p>c) Terselenggaranya pelayanan <i>Short Sea Shipping</i> yang terintegrasi dengan moda lainnya;</p> <p>d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung;</p> <p>e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi;</p> <p>f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi <i>baseline</i>;</p> <p>g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara;</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR
		h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.
3.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	<p>a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi <i>baseline</i>;</p> <p>b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta <i>flight cycle</i>;</p> <p>c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun;</p> <p>d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api;</p> <p>e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.</p>
4.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.
5.	Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	<p>a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan;</p> <p>b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.</p>
Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan		
6.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	a) <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/

NO	SASARAN	INDIKATOR
		metropolitan/besar minimal 32 %;
7.	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan	Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.
8.	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan	<p>a) Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi;</p> <p>b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedan g/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta <i>Automatic Train Protection (ATP)</i> pada jaringan kereta api perkotaan;</p> <p>c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.</p>

1.3. PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam 4 (empat) tahun terakhir perjalanan Kementerian Perhubungan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dimana hal ini telah mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan maupun evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang guna meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan dan keamanan jasa transportasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

Perubahan lingkungan strategis yang mendasari dilakukannya tinjau ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut :

1. Percepatan dari pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis Nasional;

2. Terjadinya perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportasi berkenaan dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Berkembangnya penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan transportasi serta munculnya penyedia aplikasi penyedia layanan transportasi khususnya untuk wilayah perkotaan;
4. Makin berkembangnya wilayah perkotaan dengan meningkatnya pertumbuhan permintaan perjalanan yang mengakibatkan permasalahan dalam transportasi perkotaan karena tidak seimbang antara permintaan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi;
5. Upaya pemerataan tingkat kesejahteraan rakyat dan menghilangkan kesenjangan antara Wilayah Timur dengan Wilayah Barat Indonesia sehingga membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi yang makin massif sebagai upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah terutama untuk wilayah terluar, terdepan dan rawan bencana;
6. Meningkatkan permintaan pergerakan transportasi udara terutama di Pulau Jawa yang mengakibatkan beban udara lintas utara makin padat;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai salah satu upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dengan adanya percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *good governance*.
8. Terjadinya proses penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai perwujudan amanah peraturan perundang undangan Transportasi dan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan infrastruktur sektor transportasi.
9. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan yang berbasis *outcome*, dalam rangka penerapan akuntabilitas penyelenggaraan tugas Kementerian Perhubungan, dimana diperlukan target kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
10. Keterbatasan anggaran tiap tahun yang masih jauh dari indikasi kebutuhan anggaran yang tercantum di dalam renstra sehingga berdampak pada pencapaian target pembangunan infrastruktur perhubungan
11. Adanya perubahan paradigma di dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan peran dan kontribusi swasta serta BUMN di tengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah.

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis tersebut, dibutuhkan adanya penyempurnaan dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Kementerian Perhubungan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan tinjau ulang (reviu) dokumen Renstra 2015–2019 adalah untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan dan isu-isu strategis yang ada dalam kurun waktu 2015-2019 dan memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Badan Litbang Perhubungan yang telah disesuaikan dengan Reviu RENSTRA Kementerian Perhubungan 2015 – 2019. Dokumen tinjau ulang ini juga memuat capaian pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan pada tahun 2015 sampai 2018. Sedangkan tujuan penyusunan tinjau ulang Renstra Badan Litbang Perhubungan adalah untuk menyempurnakan dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan 2015-2019 dalam memberikan panduan serta arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Perhubungan pada masa lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- a Jangkauan Waktu
Kurun waktu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan adalah tahun 2015-2019.
- b Substansi
 1. Evaluasi pencapaian rencana strategis Badan Litbang Perhubungan kurun waktu 2015-2018;
 2. Visi dan misi Badan Litbang Perhubungan;
 3. Tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja yang selanjutnya dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan program secara rinci dan terukur sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Balitbang Perhubungan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2015-2019 ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Perhubungan dan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, serta kondisi yang diharapkan pada tahun 2019.

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN

Visi dan Misi Presiden terpilih Tahun 2014 menjadi landasan dasar yang selanjutnya diturunkan secara spesifik kedalam visi, misi Kementerian Perhubungan. Visi dan Misi presiden terpilih, yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut dicapai melalui 7 misi pembangunan, yaitu :

Misi:

- (a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (b) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- (c) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- (d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- (e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- (f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- (g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWACITA)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

2.3 TUGAS POKOK, FUNGSI, VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2.3.1. Tugas Pokok Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

2.3.2. Fungsi Kementerian Perhubungan

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2.3.3. Visi

Perwujudan Visi Presiden (Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan **“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Konektivitas **Nasional** adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

2.3.4. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi
5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;

6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, penjabaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi dalam upaya mengurangi /menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas ketidakpastian situasi keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi Misi meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi terus diarahkan untuk pemenuhan akan peningkatan permintaan pelayanan transportasi, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi tetap mencukupi.
5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi Ditengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah didalam penyediaan infrastruktur perlunya mendorong peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam pemnyediaan infrastruktur sektor transportasi sehingga nantinya anggaran belanja pemerintah diarahkan untuk membangun

infrastruktur yang bersifat pelayanan publik dan dinilai tidak layak secara finansial.

6. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi Sesuai dengan prinsip *good governance* melalui penerbitan Undang-Undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi
7. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatid dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi
8. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim Sebagai upaya untuk pengembangan jasa transportasi kedepan, Kementerian Perhubungan secara terus menerus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (*global warming*) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

2.3.5. Tujuan

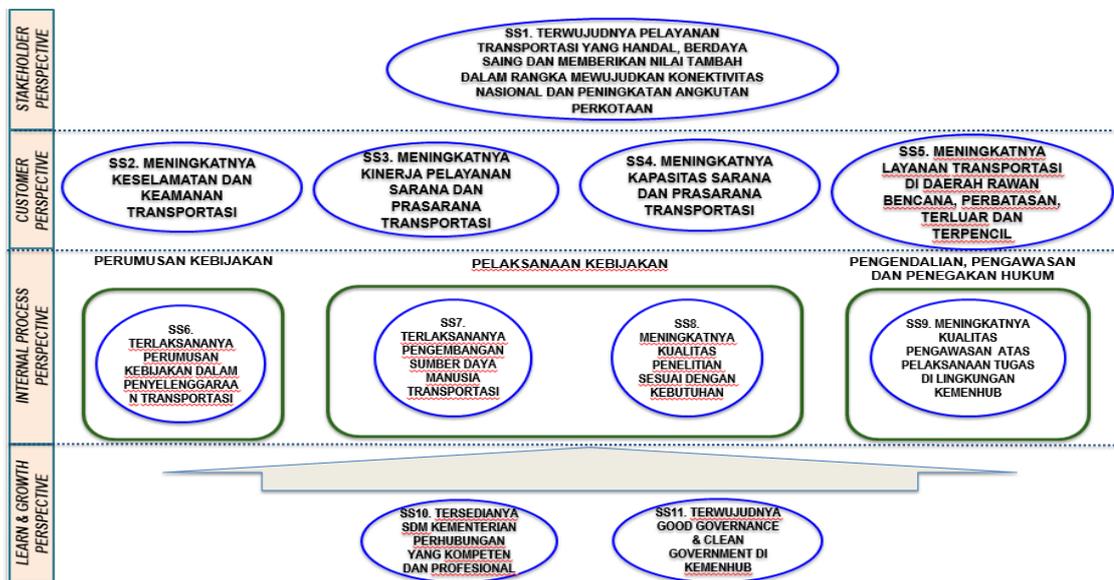
Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan;
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

2.3.6. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sector transportasi dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010 - 2014 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi empat perspective, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1

Peta Strategis Kementerian Perhubungan

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Stakeholders Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan indikator kinerja rasio konektivitas antar wilayah.

2. *Customer Perspective*

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis *Customer Perspective* sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional
 - 2) Ratio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi
- b. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Prosentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan
 - 2) Prosentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional
 - 3) Prosentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi
 - 4) Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek
- c. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Prosentase peningkatan kapasitas sarana transportasi
 - 2) Prosentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi
 - 3) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah
- d. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan dengan indikator kinerja rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

3. *Internal Process Perspective*

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis *Internal Process Perspective* sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Prosentase pelaksanaan deregulasi peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
 - 2) Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan
- b. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi, dengan indikator kinerja prosentase penyerapan lulusan diklat transportasi.
- c. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja

prosentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.

- d. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan.

4. *Learn and Growth Perspective*

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis *Learn and Growth Perspective* sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan professional, dengan indikator kinerja rasio pegawai Kementerian Perhubungan yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
- b. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah terwujudnya *good governance and clean government* di Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja :
 - 1) Penuntasan reformasi birokrasi
 - 2) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan
 - 3) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
 - 4) Keterbukaan informasi publik
 - 5) Persentase kehandalan sistem informasi
 - 6) Tingkat maturasi SPIP
 - 7) Prosentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada diagram berikut ini.

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan

mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 TUGAS POKOK, FUNGSI, VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2015-2019

2.4.1 Tugas Pokok Badan Litbang Perhubungan

Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi.

2.4.2 Fungsi Badan Litbang Perhubungan

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.4.3 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Badan Litbang Perhubungan tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai pusat pengetahuan untuk penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah.”**

2.4.4 Misi

Sementara misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Badan Litbang Perhubungan tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan penelitian, pengembangan dan teknologi (litbangtek) bagi perumusan kebijakan strategis transportasi.
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga IPTEK.
3. Meningkatkan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi.
4. Penguatan database transport.
5. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian, pengembangan dan teknologi di bidang transportasi.
6. Penguatan sarana prasarana, SDM, kelembagaan penelitian, pengembangan dan teknologi.

2.4.5 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran visi dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Litbang Perhubungan dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan kualitas penelitian sesuai kebutuhan melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi;
2. Peningkatan kualitas kinerja penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
3. Peningkatan jejaring/kerjasama penelitian dan pengembangan;
4. Peningkatan hasil identifikasi pemanfaatan penelitian melalui kegiatan monitoring;
5. Peningkatan produktivitas kinerja SDM Badan Litbang Perhubungan;
6. Peningkatan kualitas SDM Badan Litbang yang kompeten dan professional;
7. Peningkatan kegiatan publikasi kelitbangan dan diseminasi hasil penelitian;
8. Peningkatan akuntabilitas kinerja administrasi dan tata kelola pemerintahan;
9. Peningkatan optimalisasi pengelolaan anggaran, BMN, dan layanan perkantoran.

2.4.6 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu output dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan dan memperhatikan permasalahan dan capaian pada tahun 2010-2014 serta menjabarkan misi Badan Litbang Perhubungan.

Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran. Perumusan indikator sasaran menjadi landasan untuk perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019. Konektivitas perumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Litbang Perhubungan untuk kurun waktu 2015-2019 disampaikan pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel. 2.1

KONEKTIVITAS TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2015 – 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN
1.	Peningkatan kualitas penelitian kinerja penelitian	Terlaksananya kegiatan penelitian yang tepat sasaran dan tepat guna	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan untuk transportasi pelayanan	Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian dalam perumusan kebijakan strategis transportasi	1. Prosentase penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	%
					2. Prosentase pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2), t adalah tahun IKU	%

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun dengan pertimbangan bahwa IKU tersebut merupakan indikator hasil (*outcome*) pada tingkat Eselon I. Sesuai dengan tupoksi sasaran program untuk tingkat Eselon I Badan Litbang Perhubungan periode 2015-2019 adalah **“Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Transportasi”**. Dalam hal ini arah kebijakan dan strategi litbang perhubungan merupakan penjabaran lebih lanjut untuk pencapaian program tersebut. Dalam pencapaian sasaran program tersebut akan sangat tergantung dari kinerja program/kegiatan yang mendukung IKU Badan Litbang Perhubungan, yaitu IKU pada tingkat Eselon II sebagai indikator keluaran (*output*) atau Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan target capaian dari masing-masing kegiatan unit Eselon II.

Pada restrukturisasi program dan kegiatan Badan Litbang Perhubungan tahun 2015-2019 tidak dikelompokkan berdasarkan kegiatan per-unit kerja tetapi dibagi dalam 2 kelompok kegiatan besar, yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis dan Dukungan Manajemen Lainnya. Adapun pemetaan struktur program dan kegiatan Badan Litbang Perhubungan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Transportasi	1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi	1. Penelitian dan Pengembangan Transportasi
	2. Dukungan Manajemen Teknis dan Dukungan Manajemen Lainnya	1. Penyusunan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan
		2. Publikasi, Sosialisasi dan Diseminasi (Publikasi/Promosi)
		3. Penyelenggaraan Workshop/Seminar/FGD/Rakor
		4. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
		5. Capacity Building
		6. Penyusunan Updating Data dan Informasi
		7. Layanan Perkantoran
		8. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
		9. Tata Kelola Kepegawaian
10. Gedung/Bangunan		

BAB III

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2015 - 2018

Pada periode RENSTRA tahun 2015-2018, Badan Litbang Perhubungan telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2018 berdasarkan program kegiatan Badan Litbang Perhubungan adalah sebagai berikut:

3.1 HASIL PENELITIAN TRANSPORTASI 2015 – 2018

Selama kurun waktu 2015-2018 kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan berupa penelitian/ studi dan telaahan/ kajian. Kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara berupa penelitian/studi dan telaahan/kajian berupa penelitian kebijakan perencanaan yang baik yang sifatnya lintas sektoral dan berupa penelitian dukungan, maupun penelitian yang sifatnya mendukung kebijakan untuk sector transportasi tertentu. Jumlah keseluruhan kegiatan penelitian yang dibiayai anggaran APBN dari tahun 2015-2018 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015 -2018

JUDUL STUDI TAHUN 2015	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1.	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
2	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Tarakan
3	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Bogor
4	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Surakarta
5	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kota Jogjakarta
6	Penyusunan Pedoman Harga Satuan Pekerjaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
7	Kajian Strategis Implementasi Hasil Penelitian Dalam Rangka Mewujudkan PNBPN
8	Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Perhubungan
9	Survey Asal Tujuan Bodetabek
PUSLITBANG MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA	
1	Pedoman Pembangunan Integrasi Transportasi dalam Pembangunan dan Desain <i>Logistic Center</i>
2	Evaluasi Implementasi PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan PM No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda
3	Pengembangan Aksesibilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke Sumatera Utara
4	Kesiapan Transportasi Multimoda dalam mendukung <i>Short Sea Shipping</i> di Pulau Jawa
5	Kesiapan Transportasi Multimoda dalam Rangka Mendukung Pengoperasian Jalur Ganda (<i>Double Track</i>) Kereta Api Jakarta-Surabaya Jakarta-Surabaya
6	Pengembangan Terminal Multimoda Berbasis Angkutan Kereta Api untuk Mendukung Optimalisasi Angkutan Barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
7	Integrasi Rencana Induk Transportasi Nasional (Sistranas Pada Tatranas)
8	Masterplan Sistem Logistics Center dalam Rangka Keterpaduan Transportasi di Indonesia (<i>Studi kasus kesiapan transportasi untuk mendukung logistics center di Koridor Jawa</i>)
9	Pengembangan Urban Logistics dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang di Kota Surabaya

10	Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi di Propinsi Bengkulu Dalam Konteks Negara Maritim dan Penguatan Daerah Tertinggal
11	Penyusunan Pedoman Evaluasi Kemanfaatan Investasi Transportasi Publik
12	<i>Updating</i> Pengukuran Kinerja Logistik Indonesia (LPI Indonesia)
13	Strategi Perwujudan Regulasi Sistem Transportasi Nasional
14	Studi Desain dan Uji Coba Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN)
15	Penyusunan Pedoman Implementasi Standar Pelayanan Bidang Perhubungan (studi kasus SPM bidang angkutan jalan)
16	Implementasi <i>Intermodal Transport Data Base</i> (ITDB)
17	Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak
18	Distribusi Pengguna <i>Commuter Line</i> (CL) dalam Pemanfaatan Fasilitas Publik Pejalan Kaki Mencapai Objek Wisata Kebun Raya Bogor
19	Pengembangan Angkutan Pemadu Moda Terminal Dhaksinarga Wonosari-Bandara Adi Sutjipto-Stasiun Tugu
20	Penyusunan Rencana Jaringan Multimoda di Kota Gorontalo
21	Kajian Pengembangan <i>Shuttle Bus</i> Destinasi Pariwisata
22	Tinjau Ulang Jaringan Transportasi Penumpang di Kab. Pringsewu
23	Tinjau Ulang Jaringan Transportasi Barang di Kab. Pringsewu
24	Tinjau Ulang Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi di Kab. Pringsewu
25	Kajian Penentuan Lokasi Terminal Angkutan Barang di Kab. Banyuwangi
26	Pengembangan Fasilitas Lajur Khusus Sepeda di Perkotaan Wonosari Kab. Gunung Kidul
27	Pengembangan Jaringan Transportasi dan Simpul Transportasi (Gunung Kidul)
28	Penyusunan Jaringan Trayek dan Jaringan Lintas Gorontalo
29	Evaluasi Jaringan Lintas Angkutan Barang di Bengkulu
30	Sistem Informasi Pergudangan di Palembang
31	Revitalisasi Layanan Intermoda Angkutan Laut Tanjung Tiram ke Kuala Tanjung
32	Pengembangan Transportasi Provinsi Kalimantan Selatan
33	Pengembangan Transportasi Nusa Tenggara
34	Pengembangan Transportasi Provinsi Bali
35	Pengembangan Transportasi Provinsi Kalimantan Tengah
36	Pengembangan Transportasi Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat
37	Pengembangan Transportasi Provinsi Papua Barat
38	Pengembangan Transportasi Provinsi Maluku
39	Pengembangan Transportasi Provinsi Riau
40	Pengembangan Transportasi Provinsi Maluku Utara
41	Pengembangan Transportasi Sumatera Bagian Selatan
42	Pengembangan Transportasi Sumatera Bagian Utara
43	Pengembangan Transportasi Pesisir Barat Sumatera
44	Pengembangan Transportasi Provinsi Papua
45	Pengembangan Transportasi Sulawesi
46	Pengembangan Transportasi Jawa
PUSLITBANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN	
1	Studi Aplikasi Pencatatan dan Verifikasi Kendaraan Masuk dan Keluar Wilayah
2	Studi Penyusunan Master Plan Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah
3	Studi Penyelenggaraan Angkutan Massal Wilayah Aglomerasi Mataram dan Sekitarnya
4	Penyusunan Pedoman Analisis Dampak Lalu Lintas dan Sertifikasi Analisis Dampak Lalu Lintas
5	Studi Penyusunan Evaluasi Desain Terminal Penumpang Tipe A
6	Pengembangan Teknologi Penggunaan Jalur KA
7	Review Rencana Induk Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
8	Studi Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
9	Studi Prediksi Potensi Demand Kereta Api, Jalan Tol, dan Angkutan Laut di Sumatera

10	Profil Pengujian Kendaraan Bermotor
11	Lanjutan Penelitian Pengoperasian Motor Listrik di Jalan
12	Survei Prediksi Angkutan Lebaran 2015
13	Sistem Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
14	Penilaian Kinerja Lalu Lintas Pada Jalan Nasional di Kota-Kota Metropolitan
15	Penelitian Implementasi Tachograph Pada Kendaraan Bermotor di Jalan
16	Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Umum Jalan
17	Penelitian Pengembangan Pendeteksi Dini Longsor dan Anjlogan Pada Prasarana Kereta Api
18	Penyusunan Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
19	Studi Pemodelan Transportasi untuk Jawa Dan Jabodetabek
20	Studi Kelembagaan BPTJ
21	Kajian Updating Data dan Informasi Alur Sungai di Kota Palembang
22	Penelitian Pemanfaatan Sungai Talo Untuk Pengangkutan Barang dan Penumpang Guna Mengurangi Beban Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Makassar
23	Penelitian Pengoperasian Angkutan Lingkungan
24	Studi Peningkatan dan Pengembangan Terminal bobotsari Kabupaten Purbalingga
25	Pengembangan Sistem Transportasi di Kabupaten Sumedang Terkait adanya Rencana Pembukaan Jalan Tembus Sukasari – Lembang
26	Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Dengan Adanya Rencana Pembukaan Akses Jalur Lingkar Selatan di Sumedang
27	Kajian Penanganan Kemacetan di Ruas Jalan Raya Tanjungsari Kabupaten Sumedang
28	Kajian Konsep Kebijakan Pengelolaan Terminal Bus Tipe A (Terminal Harjamukti, Cirebon)
29	Analisis Kemacetan Perlintasan Sebidang pada Pengoperasian Kereta Api Bandara Kualanamu
30	Dampak Lalu Lintas Pada Perlintasan Sebidang di Perlintasan Sebidang Jalan Teuku Amir Hamzah (21+600) Lintas Kereta Api Bandara Kualanamu
31	Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Propinsi pada Ruas Jalan Patuk - Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul
32	Kajian Fasilitas perlengkapan dan pendukung jalan di kota Wonosari Kabupaten Gunungkidul (Ruas Jalan Agus Salim - Sugiyapranata)
33	Reaktifasi Jalur Kereta api lintas Rongkasbitung - Pandeglang - Labuhan
34	Penetapan kelas stasiun kecil untuk stasiun pada jaringan kereta api nasional
35	Penetapan kelas stasiun besar untuk stasiun pada jaringan kereta api nasional
36	Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum di Kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
37	Pengukuran Kinerja Lalu Lintas sebagai akibat pembatasan sepeda Motor pada kawasan koridor jalan utama DKI Jakarta
38	Studi Pengaruh Pembatasan kendaraan sepeda motor di kawasan koridor jalan utama DKI Jakarta
39	Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab Keselamatan
40	Studi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas di Kota Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
41	Kajian Konsep kebijakan pengelolaan Terminal Bus Tipe A (Terminal BuluPitu di Purwokerto)
42	Studi Manajemen dan Rekayasa lalu lintas Kawasan CBD (Central Business District) Kota Grogot Kabupaten Passer
43	Penelitian Pembangunan Dermaga Sungai Srimenanti di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
44	Kajian Pengembangan manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3 (tiga) Jalur Kota Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi
45	Studi Implementasi CNG Pada Kendaraan Angkutan Umum
46	Analisis Walkability Dalam Upaya Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Pejalan Kaki di Stasiun Bogor dan Bandung
47	Kajian Pengoperasia Becak Motor (Bentor) di Wilayah Gorontalo

48	Pengkajian kondisi lalu lintas pada beberapa ruas jalan di Kota Medan
49	Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian berkala Kendaraan Bermotor
50	Kajian Pengaruh Regulasi dan Fasilitas Terminal Terhadap Tingkat Kepuasan Penumpang di Terminal Bus Rajekwesi Kabupaten Bojonegoro
51	Kajian Inventarisasi Permasalahan Transportasi Daerah di Jabodetabek untuk Mendukung RITJ (DKI Jakarta dan Banten)
52	Kajian Inventarisasi Permasalahan Transportasi Daerah di Jabodetabek untuk Mendukung RITJ (Jawa Barat)
53	Kajian Optimalisasi Kereta Api Komuter Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) Dalam Mendukung Mobilitas orang di Kawasan Aglomerasi Mebidang
54	Pengaruh Pengoperasian Tol Cikapali Terhadap Jalur Pantura pada Angkutan Lebaran 2015
55	Kajian Penataan Pasar Tumpah Guna Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas di Jalur Pantai utara Jawa Barat
56	Survey Terminal Bayangan di DKI Jakarta Pada Angkutan Lebaran 2015
57	Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Bekasi - Brebes)
58	Studi Karakteristik dan Persepsi Pengguna Sepeda Motor Pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2015 (Cirebon - Subang)
59	Evaluasi Arus Mudik Angkutan Motor Gratis Lebaran 2015
60	Evaluasi Arus Balik Angkutan Motor Gratis Lebaran 2015
61	Kinerja Simpul Strategis di Kota DKI Jakarta dan Bekasi Pada Angkutan Lebaran 2015
62	Kinerja Simpul Strategis di Kota Tangerang Pada Angkutan Lebaran 2015
63	Kinerja Simpul Strategis di Kota Bandung Pada Angkutan Lebaran 2015
64	Kinerja Simpul Strategis di Kota Semarang Pada Angkutan Lebaran 2015
65	Kinerja Simpul Strategis di Kota Solo Pada Angkutan Lebaran 2015
66	Kinerja Simpul Strategis di Kota Yogyakarta Pada Angkutan Lebaran 2015
67	Kinerja Simpul Strategis di Kota Surabaya Pada Angkutan Lebaran 2015
68	Pengkajian Kemungkinan Stasiun di Kota Cirebon Sebagai Stasiun Bongkar Muat Angkutan Barang
69	Pengembangan Trayek di Kota BanjarBaru
70	Preferensi Pengguna Angkutan Jalan di Kota Banjarbaru
71	Studi Manajemen Angkutan Barang Pada Ruas Jalan Adi Sucipto di Wilayah Kabupaten Kuburaya
72	Studi Kemungkinan Penerapan ERP (Elektronik Road Pricing) di Kota Medan
73	Preferensi Pengguna Angkutan Jalan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Jember
74	Studi Jaringan Pelayanan Angkutan Umum dalam Kota di Kabupaten Jember
75	Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum di Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Pariwisata di Danau Toba
76	Kajian Penertiban Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) di Wilayah Kota Cirebon
77	Kajian Peningkatan Fasilitas Pejalan Kaki di Perkotaan Wonosari
78	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Magelang
79	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Cimahi
80	Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Keselamatan Berlalu lintas di Kota Bogor
81	Kajian Supply Demand BRT pada Rencana Koridor I Mataram
82	Kajian Supply Demand BRT pada Rencana Koridor II Mataram
83	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Kediri
84	Kajian Audit jalan Guna Mengurangi Rawan Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Ciamis
85	Kajian Pengembangan KA komuter Surabaya-Sidoarjo Lintas Surabaya Kota -Bangil ditinjau dari permintaan Penumpang di Surabaya
86	Analisis kebijakan penyelenggaraan angkutan anak sekolah di kota Bandung
87	Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Juknis Pelaksanaan DAK tahun 2016
88	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Simpang Empat Mall Ska Pekanbaru

89	Revitalisasi Sungai Kandilo sebagai Lalu Lintas Angkutan Air di Tanah Grogot Kabupaten Passer Provinsi Kalimantan Timur
90	Studi Profil Bidang Lalu Lintas di Kota Mataram
91	Studi Penyusunan Profil Keselamatan Transportasi Darat di Kota Mataram
92	Studi Profil Penyusunan Profil transportasi multimoda di Kota Mataram
93	Studi Penyusunan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum di Kota Mataram
94	studi penyusunan profil angkutan umum di kota solok (PADANG)
95	Studi Penyusunan Profil Lalu lintas di Kota Solok (PADANG)
96	Studi Bidang Keselamatan Lalu lintas di Kota (Solok) Padang
97	Studi Penyusunan Profil Lalu Lintas di Kota Banjarbaru
98	Studi Profil Bidang Keselamatan Lalu lintas di Kota Banjarbaru
99	Studi Profil Bidang Multimoda di Kota Banjarbaru
100	Kajian Penerapan Ruang Henti Khusus Kendaraan (RHK) Sepeda Motor Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Simpang
101	Studi Koordinasi Simpang dengan Pemberian Prioritas Pada Bus Trans Bandar Lampung
102	Analisa Pengaruh Kegiatan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night) Terhadap kinerja Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung
103	Studi Penyusunan Profil Lalu lintas di Kabupaten FakFak
104	Studi Penyusunan Profil Angkutan Umum di Kota Magelang
105	Analisis Pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto terhadap Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten Sidoharjo
106	Analisis Kebutuhan Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Bandung
107	Studi Analisis Angkutan wisata Ciwidy di Kabupaten Bandung
108	Analisis Penataan Lalu Lintas di Jalan (Kopo)- Soreang di Kabupaten Bandung
109	Kajian Pengaruh Penerapan Lajur Khusus Bus Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Rencana Penerapan Lajur Khusus Bus Trans Metro Bandung)
110	Pengajian Stasiun di Wilayah Bandung dan Sekitarnya sebagai Lokasi Bongkas Muat Angkutan Batubara
111	Analisis Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan di Indonesia
112	Validasi Survey Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2015
113	Analisa Pelayanan Penggunaan Tol cipularang dengan memakai Intsertvqua
114	Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Tanjung Duri Terhadap Nilai Waktu dan Biaya Perjalanan di Kota Batam
115	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kota Batam (Studi Kasus di Jalan Umum Bareleng)
116	Kajian elektrifikasi jalur kereta api Yogyakarta - Surakarta
117	Evaluasi Kinerja Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang
118	Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Apartment Bliss park di Kota Batam
119	Studi Manajemen Rekayasa Lalu - Lintas (SSA) di Kabupaten Sukabumi
PUSLITBANG PERHUBUNGAN LAUT	
1	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Larat dan Taniwel
2	Penelitian Evaluasi Pelabuhan UPT yang Dapat Diusahakan
3	Penelitian Pengembangan Transportasi Laut untuk Daerah Terpencil dalam Mendukung Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Maluku
4	Penelitian Pengembangan Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut di Indonesia
5	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Tifure dan Mangga Dua
6	Penelitian Standar Kapal dan Alur Pelayaran Pada Simpul Jaringan Trayek Utama (Trunk Route)
7	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Loleojaya dan Jailolo
8	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Dama dan Darume
9	Penelitian Kebutuhan Fasilitas Kapal Penumpang Berdasarkan Gender
10	Penelitian Pengembangan Transportasi Laut Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara Timur

11	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Bicoli dan Tapaleo
12	Penelitian Model Sistem Logistik dalam Mendukung Konektivitas Infrastruktur Transportasi Laut di Provinsi Maluku Utara
13	Penelitian Optimalisasi Jaringan Angkutan Laut di Indonesia
14	Penelitian Pelayanan Kapal Komersial (Kapal Peln) untuk Masuk pada Setiap Ibukota Kabupaten/Kota Maluku
15	Penelitian Pengembangan Angkutan Air dalam Mendukung Pengembangan Kawasan MIFFE di Merauke
16	Studi Masterplan Pelabuhan Laut Galela dan Bisui
17	Kajian Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Peralatan Keselamatan Pada Moda Transportasi Laut dan Penyeberangan di Propinsi Maluku
18	Kajian Pengembangan Simpul Potensial Transportasi Sungai di Kab Musi Banyuasin
19	Kajian Analisis Pelabuhan Diusahakan Oleh PT. (Persero) Pelindo IV Yang Merugi dan Diusulkan Untuk Dikelola Oleh Pemerintah
20	Kajian Kelayakan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Uf Mar dan Pelabuhan Weduar
21	Kajian Dampak Pengerukan dan Reklamasi Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan di Indonesia
22	Kajian Evaluasi Pembangunan Dermaga Pelayanan Rakyat Pelabuhan Kalianget
23	Kajian Evakuasi Pembangunan Pelabuhan Laut Tiram Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat
24	Kajian Peningkatan Pelayanan Perintis Untuk Wilayah Kepulauan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan.
25	Kajian Pengembangan Pelayanan Perintis Pada Pulau Terisolir di Kepulauan Riau
26	Kajian Pengembangan Pelabuhan Talamuta di Teluk Tomini Kabupaten Boalemo, Gorontalo Utara
27	Kajian Pengembangan Kawasan Pelabuhan Kontainer Matui di Kabupaten Halmahera Barat
28	Kajian Analisis Pemilihan Lokasi Penggati Pelabuhan Cilamaya
29	Kajian Kelayakan Pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Susu Sebagai Pelabuhan Umum
30	Kajian Pengembangan Jaringan Transportasi Angkutan Laut RYTE Sei Berombang ke Teluk Nibung
31	Kajian Kewenangan Statutori Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar ke Luar Negeri
32	Kajian Pelabuhan UPT yang Dapat di Usahakan Dengan Model Badan Layanan Umum (BLU)
33	Kajian Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut di Kawasan Timur Indonesia
34	Kajian Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut di Kawasan Barat Indonesia
35	Kajian Peningkatan Hierarki Pelabuhan Malindung, Tarakan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan
36	Sinkronisasi Evaluasi Kemanfaatan Tahun 2015
37	Kajian Usulan Pembangunan Dermaga di Karimun Jawa
38	Kajian Peningkatan Dermaga/Pelabuhan di Kabupaten Buton Tengah
39	Kajian Penambahan Kapal Perintis di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi
40	Kajian Peningkatan Pembangunan Pelabuhan Penumpang Speed Boat Malinau Kota, Kalimantan Utara
41	Kajian Pengoperasian Rute Transportasi Laut Ke Wilayah Amfoang, Nusa Tenggara Timur
42	Kajian Pembangunan Dermaga Pelabuhan Waiwadan, Nusa Tenggara Timur
43	Kajian Pembangunan Dermaga Kapal Cepat Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang
44	Kajian Evaluasi Kemanfaatan Tahun 2016 di Kawasan Barat Indonesia
45	Kajian Evaluasi Kemanfaatan Tahun 2016 di Kawasan Timur Indonesia
46	Kajian Kebutuhan Transportasi Penyeberangan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
47	Kajian Sarana Transportasi laut di Kabupaten Lombok Utara
48	Kajian Pembangunan Fasilitas Sarana Prasarana terminal penyeberangan di Kota Tual
49	Kajian Potensi Pembangunan Pelabuhan Wisata Bahari Kabupaten Sorong

50	Kajian Potensi Pembangunan Pelabuhan Wisata Bahari Kabupaten Lombok
51	Kajian Kriteria Penilaian Kemanfaatan Investasi Sektor Transportasi Laut
PUSLITBANG PERHUBUNGAN UDARA	
1	Studi Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Bandar Udara
2	Studi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembangunan Balai Penelitian Teknologi Keselamatan Penerbangan
3	Studi Pengelolaan Lalu Lintas Penerbangan dan Penataan Rute Penerbangan di Indonesia
4	Penelitian Pengembangan Software untuk Metoda Analisa Damage Tolerance Repair Struktur Pesawat Terbang
5	Penelitian Supply Chain dan Metoda Manufacture Bahan Composite untuk Sektor Transportasi Udara
6	Studi Pengembangan Bandar Udara Aerotropolis di Indonesia
7	Studi Evaluasi Kinerja dan Penataan Rute Angkutan Udara Perintis di Kawasan Timur
8	Penelitian Implementasi Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) di Indonesia
9	Studi Kebutuhan Peralatan dan Sumber Daya Manusia Balai Penelitian Teknologi Keselamatan Penerbangan
10	Penelitian Implementasi Peralatan Multi User Check In System di Bandar Udara
11	Penelitian Evaluasi dan Kesiapan Air Navigation Training Area
12	Studi Biaya Jasa Pelayanan Navigasi
13	Studi Potensi Peningkatan Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri (Local Content) Dalam Rancang Bangun Pesawat Produk Indonesia
14	Pengkajian Beban Kerja Pemandu Lalu Lintas Penerbangan
15	Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandara UPT. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Raden Inten II-Bandar Lampung
16	Pengkajian Persiapan Bandar udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Dalam Mendukung Pelaksanaan ASIAN GAMES ke XVIII Pada Tahun 2018
17	Pengkajian Pembangunan Bandar Udara Baru di Kota Singkawang – Kalimantan Barat
18	Pengkajian Kelayakan Pembangunan Landasan Pesawat Ampibi Perairan Danau Toba-Sumatera Utara
19	Pengkajian Peningkatan Fungsi Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Kantor Otoritas Bandara di Bandar Udara Sultan Hasanuddin-Makassar
20	Pengkajian Konsistensi Pembangunan dan Pengembangan Bandara Mozes Kilangin-Timika
21	Pengkajian Peningkatan Pelayanan Air Traffic Services (ATS) di Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
22	Pengkajian Rencana Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Bandara Malikussalaeh Kabupaten Aceh Utara
23	Pengkajian Strategi Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara (Tindak Lanjut Surat Edaran No. HK.209/I/II PHB. 2014)
24	Pengkajian Revitalisasi Bandara Banding Agung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan
25	Pengkajian Pengembangan dan Pembangunan Bandar Udara Alas Leuser – Aceh
26	Pengkajian Perubahan Ketentuan Penetapan Tarif Terhadap Pemilihan Maskapai Oleh Penumpang
27	Pengkajian Dampak Penerbangan Perintis Terhadap Kemajuan Daerah 5-10 Tahun Terakhir
28	Pengkajian Human Factor SDM Ground Handling di Bandar Udara Adi Sutjipto-Yogyakarta
29	Pengkajian Faktor Frekuensi Insiden dan Kecelakaan Terhadap Pemilihan Maskapai Penerbangan
30	Pengkajian Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Terminal Kargo Bandar Udara Juwata-Tarakan
31	Kajian Manajemen Pergerakan Kendaraan di Apron Bandar Udara Dalam Meningkatkan Keselamatan Penerbangan
32	Kajian Pengembangan Bandar Udara Blimbingsari Dalam Mengantisipasi Perkembangan Penumpang 5 (lima) Tahun Kedepan
33	Kajian Penerapan Fasilitas Navigasi Penerbangan di Cabang Padang

34	Kajian Manfaat Pembangunan Fasilitas Garbarata di Bandar Udara UPBU (Bandar udara Mutiara Palu)
35	Kajian Pengembangan Jaringan Rute Penerbangan Bandar Udara Juwata Tarakan untuk Mendukung MP3EI
36	Kajian Pengembangan Bandar Udara Paloh Sambas Kalimantan Barat
37	Kajian Alih Status Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di Kelola Pihak Swasta
38	Kajian Fasilitas Bandar Udara Untuk Meningkatkan Pelayanan dan Menunjang Pertumbuhan Permintaan Jasa Angkutan Udara di Bandar Udara Raden Inten II-Lampung
39	Kajian Pengembangan Bandar Udara Pusako Anak Nagari
40	Kajian Pengiriman Cepat Kargo Perusahaan Angkasa Pura Logistik (APL) di Bandar Udara Juanda Surabaya
41	Kajian Kinerja Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Navigasi Penerbangan Dalam Mendukung Operasional Lalu Lintas Udara Pada Air Navigasi Indonesia Cabang Padang
42	Kajian Perlindungan Konsumen Angkutan Udara Terhadap Penyedia Jasa Angkutan Udara
43	Kajian Pelayanan Penumpang di Terminal 2 Bandar Udara Juanda Surabaya
44	Kajian Optimalisasi Peran Kantor Otoritas Bandara Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas/Fungsi Pengawasan Pada Bandara Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU)
45	Kajian Rasio Beban Kerja SDM Kantor Otoritas Bandara Terhadap Tugas dan Fungsi Pengawasan Pada Bandara
46	Kajian Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Keamanan di Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo
47	Kajian Sistem Pengamanan di Sekitar Wilayah Kerja Bandar Udara
48	Kajian Penerapan SMS di Bandar Udara Raden Inten II-Lampung
49	Evaluasi Kinerja Petugas Keamanan Bandar Udara Raden Inten II-Lampung
50	Kajian Ketersediaan SDM dan Peralatan Navigasi Penerbangan di AirNav Gorontalo
51	Kajian Pengembangan Bandar Udara Sampit
52	Kajian Crashworthiness Pada Struktur Pesawat Udara
53	Kajian Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Haluoleo Kendari
54	Kajian Pemotongan Bukit di Bandar Udara Sebagai Standar Keselamatan Penerbangan
55	Kajian Persepsi Penumpang Terhadap Pemilihan Low Cost Carrier
56	Kajian Pemodelan Optimasi Penjadwalan Angkutan Pemasu Moda Bandara dengan Pendekatan Program LINDO (Studi Kasus Bus DAMRI Bandara Soetta)
57	Kajian Pemodelan Demand Forecasting Untuk Penumpang Angkutan Udara Dengan Pendekatan Sistem Dinamis
58	Evaluasi Besaran PSC Terhadap Pelayanan Penumpang
59	Kajian Dampak Peralihan Organisasi (UPT ke AIRNAV) terhadap Personel Teknisi Penerbangan
60	Kajian Peran Jasa Groundhandling Terhadap Pelayanan Air Cargo Dalam Menghadapi Kompetisi Global
61	Kajian Penerimaan Eco Airport di Terminal III Bandara Soekarno Hatta
62	Kajian Pembangunan Bandar Udara Maratua di Berau Kalimantan
63	Kajian Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Wunopito Lewoleba Kabupaten Lembata
64	Kajian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hasil Kerja ATC di Bandar Udara
65	Kajian Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Penerbangan di Bandar Udara
66	Kajian Pembangunan Terminal Baru Bandara H. AS. Hanandjoeddin
67	Kajian Analisa Kebutuhan Area Parkir Kendaraan Bermotor di Bandar Udara Blimbingsari-Banyuwangi
68	Kajian Analisa Permasalahan Pada Bandara yang Letaknya Berdekatan (Studi Kasus Malang dan Surabaya)
JUDUL STUDI LINTAS SEKTORAL TAHUN 2016	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Malaka
2	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Lombok Tengah
PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	

1	Integrasi Masterplan Kereta Api dengan Bandara Juanda di Surabaya
2	Integrasi Masterplan Kereta Api dan Pelabuhan Soekarno Hatta di Makassar
3	Studi Pelaksanaan Survey Asal Tujuan Transportasi Nasional
4	Kebutuhan Pengembangan Angkutan Multimoda di Daerah Pesisir Provinsi Maluku
5	Penentuan lokasi terminal angkutan barang dan kawasan distribusi dan/koleksi barang dalam sistem angkutan perkotaan di kota Bogor
6	Penentuan Lokasi Simpul Integrasi Jaringan Kereta Api dan BRT dengan Bandara Syamsudin Noor
7	Integrasi Angkutan Penyeberangan dan Bus di Kabupaten Wakatobi
8	Kajian Kebutuhan Angkutan Pemasu Moda, Pariwisata dan Sekolah di Kabupaten Wakatobi
9	Potensi Pengembangan Pelabuhan Labuhanhaji menjadi Pelabuhan Laut (Logistik) di Kabupaten Aceh Selatan
10	Integrasi Jaringan Transportasi di Kabupaten Sidoarjo
11	Pengembangan Jaringan Angkutan Barang di Kabupaten Sidoarjo
12	Pengembangan Jaringan Angkutan Penumpang di Kabupaten Sidoarjo
13	Kajian Integrasi Transportasi di Kota Cirebon
14	Integrasi Moda di Pelabuhan Penyeberangan Sibolga
15	Integrasi Moda di Stasiun KA Tebing Tinggi
16	Profil Transportasi Kabupaten Bovendigoel
17	Desain Jalur Sepeda di Wilayah Wonosari Kabupaten Gunung Kidul
18	Studi Terminal Terpadu Antar Moda beserta Angkutan Terpadu Antarmoda di Kabupaten Banyuwangi
19	Mekanisme Pemberian Subsidi Angkutan Umum Untuk Anak Sekolah di Kabupaten Banyuwangi
20	Konektivitas Transportasi Antarmoda Terhadap Rencana Pembangunan Bandar Udara di Tulungagung

PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN

1	Studi Penyusunan Rencana Induk Terminal Wilayah Sumatera (Terminal A Padang dan Terminal Tipe A Bandar Lampung)
2	Studi Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Bus AKAP di Wilayah Jawa Timur
3	Studi Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Bus AKAP di Wilayah Jawa Tengah
4	Studi Survei Prediksi Angkutan Lebaran 2016
5	Studi Pembuatan Prototype Alat Pencatatan Penggunaan Jalur KA dalam Perhitungan TAC
6	Studi Penyusunan Pedoman Pola Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta untuk Pengujian Kendaraan Bermotor
7	Studi Penyusunan Standar Kompetensi SDM Penyelenggara Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor
8	Studi Penyusunan Pedoman Pola Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta untuk Penyelenggaraan Terminal
9	Studi Penyusunan Standar Kompetensi SDM Penyelenggaraan Terminal
10	Studi Penyusunan Standar Kompetensi SDM Penyelenggaraan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
11	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Salatiga
12	Kajian Perlintasan Sebidang Kereta Api dan Jalan di Kota Cirebon
13	Penilaian Kinerja Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
14	Optimalisasi Kinerja Persimpangan di Kota Pekanbaru
15	Kajian Mengenai Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Kabupaten Musi Banyuasin
16	Evaluasi Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Yogyakarta
17	Kajian Evaluasi Kinerja Operasional Terminal Tipe A di Jalur Pantura
18	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Cirebon
19	Kajian Efektifitas Bus Rapid Transit (BRT) Transmisi Terkait dengan Pembangunan
20	Evaluasi Pelayanan Angkutan Kereta Api di Bandara Kualanam
21	Kajian Pengelolaan dan Penetapan Parkir di Pusat Kegiatan Kabupaten Paser

22	Kajian Penataan Perpakiran di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
23	Kajian Penataan Perpakiran di Badan Jalan Kota Cirebon
24	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Pekalongan
25	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Bojonegoro
26	Kajian Kinerja Operasional Terminal di Kabupaten Paser
27	Pengembangan Angkutan Pariwisata dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kab. Gunung Kidul
28	Studi Dampak Kemacetan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Pantai Mahardika
29	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Ngawi
30	Kajian Aksesibilitas Pemukiman Menuju Koridor Utama Angkutan Umum di Jabodetabek
31	Kajian Integrasi Moda pada Koridor Utama Angkutan Umum di Jabodetabek
32	Kajian Pemilihan Moda antara Angkutan AKAP dengan Angkutan Travel (Studi Kasus Rute Banjarmasin - Palangkaraya)
33	Kajian Pola Operasi dan Biaya Investasi Pembangunan Kereta Api Bandar Udara Adi Sumarmo Surakarta
34	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Rest Area Tol Jakarta - Cikampek
35	Studi Evaluasi Manajemen Perparkiran di Kota Dumai
36	Pengaruh Keikutsertaan Indonesia pada Trans Pacific Partnership (TPP) terhadap Regulasi Bidang Perkeretaapian
37	Dampak Integrasi Gardu Tol terhadap Kinerja Jalan Tol (Studi Kasus Gardu Tol Palimanan - Brebes Timur)
38	Kajian Teknis Pemanfaatan Wire Rope sebagai Perangkat Pengaman Lalu Lintas
39	Evaluasi Penggunaan Pool dan Agen Bus sebagai Tempat Pemberangkatan Bus AKAP
40	Evaluasi Perizinan/Ketentuan Wilayah Operasi Bus Pariwisata
41	Evaluasi Pentingnya Rest Area pada Jaringan Jalan Tol Antar Kota (Studi Kasus Tol Cipali)
42	Opini Pemudik Sepeda Motor yang Tidak Mengikuti Mudik Gratis Kementerian
43	Kajian Dampak Keikutsertaan Indonesia dalam Trans Pacific Partnership (TPP) terhadap Regulasi Bidang Transportasi Jalan
44	Evaluasi Kinerja Angkutan Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Perum Damri pada Trayek Pontianak - Kuching
45	Manajemen Perparkiran di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
46	Dampak Waktu Transaksi Pembayaran Tol Panjang Antrian terhadap Panjang Antrian Pintu Keluar Tol (studi Kasus Tol Cikarang - Brebes)
47	Studi Transportasi menuju Destinasi Wisata Borobudur Provinsi Jawa Tengah
48	Analisis dan Simulasi Kemacetan Lalu Lintas Saat Lebaran 2016 di Tol Pejagan - Brebes Timur
49	Analisis dan Simulasi Lalu Lintas dari Gerbang Tol Pemalang untuk Antisipasi Macet Lebaran 2017
50	Kajian Monitoring dan Analisis Pergerakan Tanah pada Prasarana Kereta Api
51	Kajian Pembangunan Jalur Layang (Elevated) Rel Kereta Api Lintas St. Purwosari - St. Jebres
52	Uji Coba Metodologi Penghitungan Volume Lalu Lintas Sepeda Motor Waktu Libur Panjang di Pantura
53	Studi Transportasi menuju Destinasi Kawasan Wisata Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur
54	Studi Penyusunan Peta Rawan Gempa pada Prasarana Transportasi Jalan dan Kereta Api
55	Kajian Peningkatan Kecepatan Perjalanan Kereta Api Lintas Jakarta-Surabaya Ditinjau dari Biaya
56	Kajian Pembangunan Stasiun Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung dengan Pendekatan Transit Oriented Development (TOD)
57	Studi Penyusunan Peta Simpul Transportasi
58	Kajian Pedoman Transit Oriented Development pada Simpul Transportasi
59	Pengaruh Disiplin Pengendara Sepeda Motor, Kondisi Sepeda Motor dan Jalan terhadap Keselamatan Berlalu Lintas di Kota Bogor Tahun 2016 (Survei Jalan Raya Tajur dan KS. Tubun)
60	Studi Transportasi menuju Destinasi Wisata Danau Toba Provinsi Sumatera Utara

PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Studi Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Wahai dan Ambalau di Maluku
2	Studi Masterplan Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan Namrole dan Luhu di Maluku
3	Studi Masterplan Pelabuhan Penyeberangan Ohoiraut dan Elat di Kabupaten Maluku Tenggara
4	Studi Evaluasi Kinerja Pelabuhan yang Tidak Diusahakan di Pulau Kalimantan
5	Studi Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Indonesia III dan IV
6	Studi Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Indonesia I dan II
7	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Kobisadar dan Saparua/Haria
8	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Tulehu dan Hatu Piru
9	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Tehoru dan Bemo
10	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Wayauwa dan Saketa
11	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Ilath dan Manipa
12	Penelitian Penyusunan Masterplan Pelabuhan Laut Hitu dan Kairatu
13	Kajian Kebutuhan Kapal Ferry Untuk Lintas Labuan Bajo - Pulau Komodo - Pulau Rinca Dalam Mendukung Pariwisata Di NTT
14	Penelitian Desain Kapal Feeder Untuk Mendukung Tol Laut Dan Konektivitas Angkutan Laut
15	Kajian Kebutuhan Angkutan Laut dan Penyeberangan Jarak Dekat di Kabupaten Alor
16	Kajian Tinjau Ulang DLKR dan DLKP Pelabuhan Ambon
17	Kajian Pembangunan Pelabuhan Laut Wonti Waropen Papua
18	Kajian Evaluasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Swarangan Pelaihari
19	Kajian Evaluasi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lalar Di Kab. Sumbawa Barat Prov. NTB
20	Kajian Revitalisasi Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur
21	Kajian Lintas Penyeberangan Parigi - Wakai - Marisa
22	Kajian Angkutan Laut Pelayanan Kapal Perintis Yang Melalui Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah - Palu
23	Kajian Evaluasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Laut Amurang di Minahasa Selatan
24	Kajian Pembangunan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
25	Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Prigi dan Kebutuhan Trenggalek
26	Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
27	Kajian Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Pangkalan Bun Provinsi Kalteng
28	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T1
29	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T2
30	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T3
31	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T4
32	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T5
33	Evaluasi Dampak Angkutan Barang Dalam Implementasi Tol Laut Pada Trayek T6
34	Kajian Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh
35	Kajian Penambahan Trayek Tol Laut (T7, T8, T9) Ditinjau Dari Barang Muatan
36	Kajian Penambahan Trayek Tol Laut (T7, T8, T9) Ditinjau Dari Penurunan Disparitas Harga
37	Kajian Penambahan Trayek Tol Laut (T7, T8, T9) Ditinjau Dari Penguatan Konektivitas
38	Kajian Pengembangan Transportasi Laut Dalam Mendukung KEK Sorong
39	Kajian Evaluasi Pemberian Koneksi Terminal Petikemas Muaro Jambi, Provinsi Jambi
40	Kajian Pelabuhan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Jaringan Pelayanan
41	Kajian Pelabuhan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Potensi Demand Wilayah
42	Kajian Pelabuhan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Teknis Operasional Pelabuhan
43	Kajian Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Teknis Operasional Pelabuhan
44	Kajian Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Potensi Demand Wilayah

45	Kajian Pelabuhan Bitung Sebagai Pelabuhan Hub Internasional Ditinjau Dari Aspek Jaringan Pelayanan
46	Kajian Kelayakan Fungsi Pelabuhan Kijang Sebagai Salah Satu Pelabuhan Asal Tol Laut Pada Trayek T6
47	Kajian Optimalisasi Fungsi Pelabuhan Pontianak
48	Kajian Evaluasi Kebutuhan Pembangunan Pelabuhan Murhum Bau-bau
49	Kajian Pelayanan Kapal Ferry Penyeberangan Untuk Mendukung Pariwisata Di Kawasan Danau Toba
PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar Udara Menggelum Boven Digoel Papua
2	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Pitu Morotai-Maluku
3	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Bandaneira Pulau Banda, Maluku
4	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Korowai Batu-Merauke, Papua
5	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Tiom Lanny Jaya-Papua
6	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar udara Kiwirok-Pegunungan Bintang, Papua
7	Studi Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Bandar Udara Sibisa Kabupaten Toba Samosir
8	Penelitian Pengembangan ADS-B Transponder dan Radar Display untuk Ground Vehicle di Bandar Udara di Indonesia.
9	Penelitian Pengembangan Akses Kontrol Sistem untuk Bandar Udara
10	Penelitian Mitigasi Resiko Keselamatan Penerbangan akibat tidak Terpenuhinya Standar Landas Pacu, Strip, dan RESA di Bandar Udara
11	Pengkajian Efektivitas dan Implementasi Safety Management System (SMS) di Maskapai Indonesia
12	Pengkajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Haluoleo-Kendari
13	Kajian Kinerja Fasilitas Bandar Udara Baabullah-Ternate
14	Kajian Kapasitas Bandar Udara Juwata Tarakan di Kalimantan Utara
15	Kajian Kinerja Pelayanan Bandar Udara Mutiara-Palu
16	Kajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi
17	Kajian Kinerja Keamanan dan Keselamatan di Bandar Udara Juwata-Tarakan
18	Kajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Juwata-Tarakan
19	Kajian Peningkatan Kapasitas Fasilitas Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo
20	Kajian Pelayanan Bagasi di Bandar Udara Internasional Lombok
21	Kajian Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara-Bandung
22	Kajian Kinerja Keamanan dan Keselamatan di Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi
23	Kajian Strategi Bandar Udara H. Aroeboesman Ende dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penumpang
24	Kajian Kinerja Keselamatan, Kapasitas dan Pelayanan di Bandar Udara Ahmad Yani-Semarang
25	Kajian Kinerja Pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut-Palangkaraya
26	Kajian Analisa Kondisi Tanah Dasar Bandar Udara Juanda-Surabaya yang Berakibat Terjadinya Penurunan Tanah di Area Taxi Way
27	Kajian Fatigue dan Job Stress Air Traffic Controller (ATC)
28	Kajian Prediksi Pergerakan Lalu Lintas Angkutan Udara berdasarkan Modal Share untuk Mendukung Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kertajati-Majalengka
29	Kajian Kinerja Fasilitas Sisi Darat untuk Pengembangan Bandar Udara Bandar Udara Sultan Thaha-Jambi
30	Kajian Pilihan Penumpang terhadap Bandar Udara yang Berdekatan di Wilayah Jawa Barat
31	Kajian Kinerja Pelayanan di Bandar Udara Fatmawati Soekarno-Bengkulu
32	Kajian Kinerja Fasilitas di Bandar Udara Haluoleo-Kendari
33	Kajian Integrasi Antar Kawasandan Antar Moda Transportasi dalam Mendukung Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kertajati-Majalengka
34	Kajian Kinerja Pelayanan di Bandar Udara Sentani-Jayapura
35	Kajian Kinerja Keamanan di Bandar Udara Baabullah-Ternate

36	Kajian Rencana Penerapan Skema Badan Layanan Umum (BLU) dalam Pengelolaan Keuangan Bandar Udara dalam Mendukung Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kertajati-Majalengka
37	Kajian Konektivitas Angkutan Udara Bandar Udara Sentani-Jayapura dalam Mendukung Pengembangan Wilayah.
38	Kajian Kinerja Pelayanan Bandar Udara Djalaluddin-Gorontalo
39	Kajian Kinerja Pelayanan di Bandar Udara Ngurah Rai-Depansar
40	Kajian Potensi Pengembangan Rute di Bandar Udara Husein Sastranegara
41	Kajian Pengembangan Rute di Bandar Udara Tanjung Harapan - Tanjung Selor
42	Kajian Bandar Udara Mopah - Merauke untuk Mendukung Konektivitas Angkutan Logistik Kargo Udara di Papua
43	Pelayanan Apron Movement Control (AMC) dalam Mendukung Operasional Penerbangan pada Terminal 3 (Ultimate) Bandar Udara Soekarno Hatta - Tangerang
44	Kajian Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Keamanan Penerbangan di Bandar Udara Fatmawati - Bengkulu
45	Kajian Potensi Pengembangan Rute Bandara (Studi Kasus: Bandar Udara Mutiara - Palu)
46	Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Ground Handling PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS) pada Maskapai PT Transnusa di Bandar Udara Halim Perdanakusuma - Jakarta
47	Pengaruh Promosi terhadap Peningkatan Penjualan Tiket Pesawat (Studi Kasus: PT. Mentari Lion Air di Bandar Udara Radin Inten II - Bandar Lampung)
48	Analisis Keterlambatan Penerbangan di Bandar Udara Adi Sucipto - Yogyakarta
JUDUL STUDI LINTAS SEKTORAL TAHUN 2017	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Boven Digoel
2	Studi Sistranas Pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Minahasa Selatan
PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Evaluasi Metodologi dan Uji Coba Survei Pergerakan Orang
2	Identifikasi Kinerja <i>Logistics Performance Index (LPI)</i> Di Indonesia
3	Review Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi
4	Integrasi Prasarana Transportasi di Pelabuhan Benoa Dalam Mendukung Pengembangan Transportasi Antarmoda;
5	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Kepulauan Seribu;
6	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Tanjung Kelayang Bangka Belitung;
7	Analisis Pelayanan Alih Moda di Pelabuhan Tenggayu I Tarakan;
8	Integrasi Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi di Lampung;
9	Integrasi Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Danau Toba Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas;
10	Integrasi Pelabuhan Lembar Dan Halte <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i> /Angkutan Umum di NTB Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
11	Integrasi Stasiun Padang Dan <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i> Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
12	Integrasi Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
13	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur;
14	Integrasi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
15	Integrasi Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang dan Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
16	Integrasi Stasiun Tanjungkarang dan Halte <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i> Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi Perkotaan di Kota Bandar Lampung;
17	Integrasi Pelabuhan Kayangan NTB Dan BRT Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
18	Integrasi Pelabuhan Gilimanuk Dan Shelter Angkutan Umum Dalam Peningkatan Pelayanan

	Transportasi di Kabupaten Jembrana, Bali;
19	Integrasi Pelabuhan Padangbai dan <i>Halte Bus</i> Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
20	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pariwisata di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten;
21	Integrasi Pelabuhan Belawan dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
22	Integrasi Pelabuhan Tanjung Emas dan Halte Angkutan Umum Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi;
23	Integrasi Transportasi Antarmoda di Kawasan Destinasi Wisata Borobudur
PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Pengembangan Jaringan Jalan Untuk Kebutuhan Mobilitas Angkutan Barang Berdasarkan Hasil Survei ATTN
2	Uji Simulasi <i>Crashworthiness</i> Pada Desain Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Angkutan Penumpang di Indonesia
3	Studi Penerapan <i>Green Zone</i> di Wilayah Pemukiman dan Kawasan Wisata
4	Studi Penyusunan Rencana Induk Transportasi SARBAGITA dan KEDUNGSEPUR
5	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Kediri
6	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Boyolali
7	Audit Jalan Guna Mengurangi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Boyolali
8	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Tasikmalaya
9	Kajian Akses Dan Pelayanan Transportasi Menuju Destinasi Wisata Tanjung Lesung Banten
10	Analisis Sistem Jaringan Transportasi Kota Serang
11	Mekanisme Subsidi Angkutan Umum Bagi Pelajar Di Kabupaten Pasuruan
12	Kajian Kebutuhan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Di Kota Kendari
13	Kajian Kebijakan Tarif dan Kuota Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
14	Persepsi Terhadap Keberadaan dan Pelayanan Taxi online
15	Optimalisasi Terminal Tipe B Di Kabupaten Siak
16	Studi Analisis Dan Evaluasi Penyelenggaraan Mudik Gratis Kereta Api Dan Bus Angkutan Lebaran Tahun 2017
17	Penataan Pasar Tumpah Guna Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Pada Angkutan Lebaran 2017 Di Jalur Pantai Utara Jawa Barat
18	Persepsi Pengguna Kereta Api Pada Angkutan Lebaran Tahun 2017
19	Monitoring Dan Evaluasi Terminal Tipe A Leuwipanjang- Bandung Dan Indihiang-Tasikmalaya Pada Musim Angkutan Lebaran 2017
20	Profil Transportasi Jalan Dan Kereta Api Di Provinsi Gorontalo
21	Studi Penyusunan Profil Transportasi Jalan Dan Perkeretaapian Provinsi Bengkulu
22	Penyusunan Naskah Akademis Sistranas Bidang Transportasi Perkeretaapian
23	Penyusunan Naskah Akademis Sistranas Bidang Transportasi Jalan
24	Studi Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Banyuwangi
25	Studi Aksesibilitas Menuju Destinasi Wisata Di Pulau Morotai
26	Kajian Akses Dan Pelayanan Transportasi Menuju Destinasi Wisata Pantai Mandalika Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
27	Kajian Kebutuhan Angkutan Taksi Di Kabupaten Tasikmalaya
28	Kajian Tindak Lanjut PM 26 Tahun 2017 Diluar Tarif dan Kuota
29	Perencanaan Jalur Sepeda Di Kota Blitar
30	Studi Aksesibilitas Menuju Destinasi Wisata Di Danau Toba
31	Media Sosialisasi Keselamatan
32	Studi Penataan Parkir Di Wilayah Central Business District Kota Pati
33	Studi Kelayakan Zoss Pada Ruas Jalan Pantura Kabupaten Pati
34	Pengembangan Trayek Angkutan Pedesaan Di Wilayah Kabupaten Jember
35	Studi Pengembangan Sistem Logistik Kabupaten Sleman Untuk Mendukung Implementasi <i>Smart Regency</i>
36	Kajian Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kab.Kediri

37	Pengembangan Angkutan Jalan Perintis Riau
38	Evaluasi Pemudik Sepeda Motor Pada Lebaran Tahun 2017
39	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Terminal Tipe A Mangkang Semarang, Terminal Tirtonadi Surakarta Dan Terminal Bulupitu Purwokerto Pada Masa Lebaran 2017
40	Studi Monitoring Dan Evaluasi Terminal Tipe A Tambak Osowilangun-Surabaya, Purabaya-Sidoarjo Dan Giwangan-Yogyakarta Pada Masa Angkutan Lebaran 2017
41	Survey Transportasi Asal Tujuan Penumpang Kabupaten Sumbawa Dalam Mendukung Rencana Induk Transportasi Kab. Sumbawa
42	Survey Transportasi Asal Tujuan Barang Kabupaten Sumbawa Dalam Mendukung Rencana Induk Transportasi Kab. Sumbawa
43	Perhitungan Volume lalu lintas dan kinerja ruas jalan di wilayah Sarbagita dan sekitarnya
44	Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
45	Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat
46	Kajian Kebutuhan fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Di Kab.Brebes
47	Kinerja Pengoperasian Bus BRT/Aglomerasi bantuan Pemerintah/ DAMRI/Bandung
48	Kajian Pengembangan Transportasi di daerah Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
49	Kajian Pengembangan Transportasi di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat
PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Studi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Kepulauan Riau.
2	Studi Rencana Induk Pelabuhan Danau Onan Runggu, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.
3	Studi Rencana Induk Pelabuhan Danau Sipinggan, Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.
4	Studi Rencana Induk Pelabuhan Sungai Durian Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
5	Studi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
6	Studi Optimalisasi Program Tol Laut
7	Studi Rencana Induk Pelabuhan Laut Wosu Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
8	Studi Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Terminal Konvensional
9	<i>Basic Design</i> dan <i>Keyplan</i> Kapal <i>Feeder</i> untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara.
10	Kajian Resiko Pelayaran di APBS didasarkan pada Data Pergerakan Lalu Lintas Kapal
11	Kajian Pembangunan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL)
12	Kajian Prioritas Pengembangan Pelabuhan di Pulau Bunguruan Kabupaten Natuna
13	Kajian Potret Sebaran Pelabuhan di Papua
14	Kajian Pemberdayaan Pelayaran Rakyat
15	Kajian Potret Sebaran Pelabuhan di Sulawesi
16	Kajian Profil Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Gorontalo
17	Kajian Profil Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Bengkulu
18	Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pandu Laut Dalam (<i>Deep Sea Pilot</i>) di Selat Malaka-Selat Singapura
19	Kajian Pengoperasian Kapal <i>Roll On Roll Off</i> (RoRo) untuk Penyeberangan Lintas Jakarta Surabaya Lombok
20	Kajian Pengoperasian Kapal <i>Roll On Roll Off</i> (RoRo) untuk Penyeberangan Lintas Jakarta Panjang
21	Kajian Evaluasi Lintas Penyeberangan Merak Bakauheni
22	Kajian <i>Indonesia National Single Windows</i> (INSW) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terkait Inaportnet di Pelabuhan-Pelabuhan Besar (6 Pelabuhan Utama)
23	Kajian Pola Pendanaan Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau
24	Kajian Pengelolaan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS)
25	Kajian Potret Dukungan Transportasi Laut dan Danau terhadap 10 Destinasi Wisata (Studi Kasus: Wakatobi)

26	Kajian Pola Pemberian Insentif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Kapal-Kapal Besar Generasi IV dan Kapal <i>Cruise</i>
27	Kajian Pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
28	Kajian Pengembangan Pelabuhan Salakan di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
29	Kajian Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Muntok Terminal Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat
30	Kajian Usulan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Martini (Tiptop) Biak Numfor
31	Kajian Pembangunan Pelabuhan Bagus di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
32	Kajian Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Regional Soasio/Goto di Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan
33	Kajian Pengembangan Pelabuhan Rum di Kecamatan Tidore Uta Kota Tidore Kepulauan
34	Kajian Revitalisasi Pelabuhan Rakyat Lewoleba Kabupaten Lembata, NTT
35	Kajian Kebutuhan Rehabilitasi Pelabuhan Margasari di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
36	Kajian Pembangunan Pelabuhan Lato di Kabuapten Flores Timur
37	Kajian Usulan Pembangunan Jetty Apung di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
38	Kajian Kebutuhan Penambahan Rute Pelayaran di Kabupaten Nagakeo, Propinsi NTT
39	Kajian Kelayakan Pelabuhan Mesuji untuk Masuk dalam Trayek Tol Laut
40	Kajian Kebutuhan Pengembangan Dermaga Kapal Penumpang di Pelabuhan Nunukan
41	Kajian Kebutuhan Peralatan Keselamatan Pelayaran Rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
42	Kajian Pengembangan Pelabuhan Kelapis/Malinau untuk Kegiatan Bongkar Muat
43	Kajian Kebutuhan Perbaikan Dermaga PELRA di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
44	Kajian Kemanfaatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa di Kabupaten Wakatobi
45	Kajian Kebutuhan Kapal Khusus Angkutan Ternak yang Melayani Pantai Barat Sulawesi Tengah dengan Pulau Kalimantan
PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan <i>Hub and Spoke</i> Bandar Udara untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua;
2	Penelitian Evaluasi Kinerja Otoritas Bandar Udara I Sampai Dengan Wilayah X Dalam Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara;
3	Penelitian Evaluasi Kinerja Sekolah Penerbangan Sesuai dengan <i>CASR 141</i> di Indonesia.
4	Penelitian Sarana dan Prasarana Serta Rute Penerbangan Penerbangan di Wilayah Jawa Bagian Selatan;
5	Optimalisasi Bandar Udara Adi Soemarmo Solo melalui Peningkatan Konektivitas antara Solo dan Yogyakarta dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara;
6	Evaluasi Fasilitas Prasarana Logistik/Kargo guna Mendukung Program Penurunan Disparitas Harga di Bandar Udara Sentani Jayapura;
7	Implementasi Program Keamanan Penerbangan (AOSP) pada Maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Mentari Airlines, dan Citilink Indonesia yang Beroperasi di Bandar Udara Hang Nadim Batam;
8	Pemenuhan Kriteria Bandar Udara Komodo Labuan Bajo untuk Peningkatan Status dari Bandar Udara Domestik menjadi Bandar Udara Internasional;
9	Penerapan <i>Nasional Single Windows (NSW)</i> Bandar Udara (Airportnet) sebagai Upaya Peningkatan Layanan dan Kelancaran Arus Barang Ekspor-Impor;
10	Pola <i>Public-Private Partnership (PPP)</i> dalam Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia untuk Mendukung Transportasi Udara Berkelanjutan;
11	Pemenuhan Standar Regulasi untuk Pengoperasian Pesawat Udara khususnya dalam Melaksanakan Pilot Recurrent Simulator Training;
12	<i>Upgrading</i> dan Penyesuaian Standar Peralatan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Mopah Merauke;

13	Kebutuhan <i>Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)</i> dengan Pola KSO antara GMF-AA dan MMF untuk Perawatan Pesawat Udara Kategori Normal dan Komuter di Indonesia khusus Indonesia Bagian Timur;
14	Evaluasi terhadap Kriteria Pesawat Udara yang mengalami Penuaan (<i>Aging Aircraft</i>);
15	Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu dalam Mendukung <i>Visit Bengkulu 2020</i> ;
16	Standarisasi dan Kinerja Sekolah Penerbangan untuk Pendidikan Lalu Lintas Udara (<i>Air Traffic Controller</i>);
17	Pengelolaan <i>General Aviation Terminal (GAT)</i> di Indonesia;
18	Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo Yogyakarta Ditinjau dari Tatanan Kebandarudaraan dan Aspek Keselamatan Penerbangan;
19	Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo Sebagai Bandar Udara Aerotropolis (<i>Airport City</i>);
20	Kebutuhan Jumlah Personel yang Berlisensi (Sertifikat Kecakapan) untuk Pengoperasian Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>GSE Operator</i>) di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
21	Pembangunan Depo Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Pesawat Udara (DPPU) untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Keselamatan Penerbangan di Papua;
22	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Wamena di Provinsi Papua;
23	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Timika di Provinsi Papua;
24	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis Kargo Yahukimo di Provinsi Papua;
25	Kajian Penyusunan Profile Transportasi Udara Provinsi Bengkulu;
26	Kajian Penyusunan Profile Transportasi Udara Provinsi Gorontalo
JUDUL STUDI LINTAS SEKTORAL TAHUN 2018	
SEKRETARIAT BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	
1	Penyusunan Background Study Rentra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019-2024
2	Penyusunan Database Sistem Informasi Transportasi
PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Survei Asal Tujuan Transportasi Untuk Pergerakan Orang
2	Pemantapan Naskah Akademis Sistranas (Lanjutan Penyusunan Naskah Akademis Sistranas)
3	Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Wilayah Di Papua Dalam Mendukung Tol Laut
4	Sistem Informasi Jaringan Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Kawasan Destinasi Wisata Kota Sabang
5	Pemetaan Data Sistem Informasi Pelayanan Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Kawasan Destinasi Wisata Di Lampung
6	Potensi Penggunaan E-Market Dalam Mendukung Distribusi Angkutan Barang
7	Pemetaan Regulasi Aplikasi Transportasi Antarmoda Berbasis Online
8	Kajian Permodelan Kebutuhan Angkutan Barang Di Pulau Jawa
9	Potensi Pengembangan Angkutan Multimoda Di Kabupaten Jepara
10	Strategi Pengembangan Keterpaduan Transportasi Antarmoda Di Bandara Radin Inten II
11	Pemetaan Kebijakan Transportasi Barang Di Indonesia Yang Mendukung Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
12	Kajian Permodelan Kebutuhan Angkutan Barang Di Pulau Sulawesi
13	Smart Logistic Dengan Mobile Application
14	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda Pada Kawasan Destinasi Wisata Labuhan Bajo
15	Integrasi Transportasi Antarmoda Di Kota Pekanbaru
16	Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sebagai Akibat Aktivitas Transportasi Intramoda
17	Pemetaan Data Pelayanan Transportasi Dalm Mendukung Sistim Informasi Kawasan Wisata Mandeh
18	Pemetaan Data Pelayanan Transportasi Dalm Mendukung Sistim Informasi Kawasan Destinasi Wisata Labuhan Bajo
19	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda Dalam Mendukung Kawasan Wisata Mande
20	Keterpaduan Prasarana Transportasi Antarmoda Di Bandara Maimun Saleh Sabang

21	Tipologi Potensi Transit Oriented Development (TOD) Pada Light Rail Transit (LRT) Palembang
22	Efektivitas Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Transportasi
23	Efektivitas Penerapan Multi Line Free Flow (MLFF) di Jalan Tol (Studi Kasus: Gerbang Tol Cikarang Utama)
PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Studi Skema Pembiayaan Infrastruktur Transportasi LRT/MRT
2	Studi Perencanaan Dan Penataan Jalur Kereta Api Barang Di Pulau Sumatera
3	Review Perundangan Perkeretaapian
4	Perencanaan TOD Angkutan Perkeretaapian
5	Perencanaan Dan Penataan Angkutan Barang Di Pedesaan
6	Background Study Review UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
7	Kajian Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara
8	Kajian Penataan Lalu Lintas Di Parakan Kabupaten Temanggung
9	Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Padang Pariaman
10	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Di Kabupaten Lampung Selatan
11	Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
12	Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Jalur Wisata Di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
13	Pengkajian Kondisi Lalu Lintas Pada Beberapa Persimpangan Di Kota Bandar Lampung
14	Kajian Aksesibilitas Angkutan Wisata Di Kabupaten Kutai Kartanegara
15	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Provinsi Maluku Utara
16	Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Perawang Di Kabupaten Siak
17	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum Dan Konektifitas Antarmoda Di Kabupaten Marauke
18	Penataan Transportasi Di Sekitar Stasiun Cilebut Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
19	Evaluasi Kinerja Persimpangan Fly Over Di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru
20	Evaluasi Kinerja Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Balikpapan
21	Kajian Pelaksanaan E-Tilang Untuk Angkutan Barang
22	Kajian Etika Bisnis Dalam Pengoperasian Angkutan Sewa Khusus
23	Kajian Bisnis Start-Up Bidang Transportasi Jalan Dan Perkeretaapian
24	Kajian Pemanfaatan Dashboard Digital Pada Angkutan Sewa Khusus
25	Evaluasi Implementasi Uji Berkala Angkutan Sewa Khusus
26	Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Keberadaan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum
27	Kajian Efektifitas Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta
28	Kajian Penyediaan Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Pada Angkutan Jalan Dan Perkeretaapian
29	Kesiapan Angkutan Umum Transportasi Jalan Dalam Penerapan Standar Emisi EURO 4
30	Analisis Kesiapan Jalur Mudik Angkutan Lebaran 2018 Melalui Lintas Utara Jawa (Jakarta-Semarang)
31	Analisis Kesiapan Jalan TOL (Semarang-Surabaya) Dalam Mendukung Angkutan Lebaran 2018
32	Analisis Kemanfaatan Mudik Gratis Ditinjau Dari Manfaat Ekonomi
33	Kajian Potensi Pemudik Angkutan Lebaran 2018 Berbasis Online Survey
34	Kajian Profile LRT Indonesia (Studi Kasus LRT JABODETABEK Dan Palembang)
35	Peningkatan Aksesibilitas Menuju Bandara Dengan Kereta Api Bandara
36	Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Green Zone Dikawasan Wisata Ubud Kabupaten Gianyar Bali
37	Penyediaan Fasilitas Diffable Pada Angkutan Jalan Di Kota Surakarta
38	Penggunaan Copressed Natural Gas (CNG) Pada Angkutan Umum Di Indonesia
39	Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Keberadaan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum

40	Kajian Keselamatan Di Jalur Puncak Jawa Barat
41	Kajian Kelayakan Relokasi Pembangunan Terminal Tipe C Juwana Di Kabupaten Pati
42	Kajian Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Di Provinsi Bangka Belitung (Studi Kasus Ruas Jalan Provinsi Di Jalan Kabupaten Bangka Belitung)
43	Kajian Aspek Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Di Bandara Lampung
44	Penataan Kembali Trayek Dan Rute Angkutan Kota Payakumbuh
	Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap di DKI Jakarta (Studi kasus di 10 ruas jalan utama DKI Jakarta dan Pintu Tol di Wilayah Jabodetabek)
45	Kajian Potensi Angkutan Lebaran Tahun 2018 Berbasis Online Survey
46	Potensi Pemudik Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019
PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Skema Pendanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Dan Penyeberangan
2	Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Laut Dan Penyeberangan Pada 7 Pulau Besar Di Indonesia
3	Studi Tinjau Ulang Pengoperasian Dan Jaringan Angkutan Laut Perintis Dalam Rangka Menjaga Kontinuitas Kebutuhan Bahan Pokok Dan Stabilitas Harga
4	Studi Penyusunan Grand Desain Transportasi Danau Di Kawasan Wisata Danau Toba. Sumatera Utara Dalam Rangka Mendukung Pariwisata
5	Studi Kebutuhan Subsidi Kapal Feeder Pada Trayek Tol Laut Di Pulau Natuna
6	Studi Pengembangan Trayek Tol Laut Tahun 2019
7	Studi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Transportasi Sungai Dan Penyeberangan Dalam Mendukung Jaringan Tol Laut.
8	Studi Penerapan Motorized Barge Jakarta Surabaya Dalam Mengurangi Beban Lalu Lintas Jalan Di Pantai Utara Pulau Jawa
9	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut Untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kapal Di Pelabuhan
10	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut Untuk Mengukur Kinerja Bongkar-Muat Barang Di Pelabuhan
11	Kebutuhan DO Online Untuk Integrasi Layanan Di Pelabuhan
12	Pemanfaatan Big Data Transportasi Laut Untuk Mengukur Kinerja Dwelling Time Di Pelabuhan
13	Kajian Manfaat Rumah Kita Dalam Mendukung Program Tol Laut Untuk Menunjang Kelancaran Barang
14	Kajian Desain Kapal Yang Optimal Untuk Mendukung Angkutan Laut Di Kabupaten Natuna
15	Kelayakan Pemanfaatan Dermaga Apung Di Kabupaten Boalemo. Untuk Mendukung Pariwisata
16	Kajian Keterpaduan Angkutan Laut Barang Dengan Angkutan Penyeberangan Dan Angkutan Sungai Dalam Mendukung Tol Laut Di Merauke
17	Evaluasi Penerapan Aturan Keselamatan Angkutan Sungai Di Pulau Kalimantan (Studi Kasus: Sungai Mahakam)
18	Evaluasi Penerapan Aturan Keselamatan Pemanduan Bagi Pandu Di Pelabuhan Tanjung Perak
19	Peran Pelayaran Rakyat Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah Di Kabupaten Sikka
20	Kebutuhan Tersus Ternak Untuk Optimalisasi Tol Laut Dalam Mendukung Ketahanan Distribusi Daging Nasional Di Pelabuhan Lamongan
21	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengurusan Perizinan Tersus Dan TUKS
22	Peran Konektivitas Angkutan Laut Terhadap Distribusi Pangan Di Wilayah Papua
23	TKDN Pembangunan Kapal Di Indonesia
24	Stabilitas Dan Garis Muat Kapal Yang Beroperasi Di Danau Toba
25	Keselamatan Transportasi Sungai (Studi Kasus Sungai Batanghari)
26	Pencemaran Dari Kapal-Kapal Di Bawah GT 35 Dalam Mendukung Terciptanya Laut Bersih
27	Penerapan Standar NCVS Terhadap Pembangunan Kapal Non Konvensi Dalam Rangka Menunjang Keselamatan Pelayaran
28	Pemenuhan Standar Kelaikan Peti Kemas Domestik Sebagai Alat Angkut Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Pelayaran (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)

29	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Kapal Wisata Di Raja Ampat Dalam Mendukung Keselamatan Pelayaran
30	Kesesuaian Antara Ukuran Kapal Dengan Mesin Penggerak Utama Kapal Pelayaran Rakyat (Studi Kasus : Pautere Dan Sunda Kelapa)
31	Optimalisasi Pemanfaatan Tiket Online Di Pelabuhan Laut
32	Kecukupan Dan Keandalan Rambu Navigasi Di Alur Sungai Musi
33	Ujicoba Survey Online Untuk Angkutan Laut Natal Dan Tahun Baru
34	Pemanfaatan Breakwater Terapung
35	Pengembangan Angkutan Penyeberangan Dari Pantai Barat Sulawesi Ke Kalimantan Timur (Studi Kasus : Donggala - Balikpapan)
36	Evaluasi Usulan Trayek Perintis Di Kabupaten Tojo Una Una Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
37	Pemenuhan Keselamatan Kapal Rakyat Dibawah GT 35 Di Sungai Musi Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Pelayaran
38	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Kapal Penumpang Rute Manado-Sangihe-Talaud
39	Peran BP2TL Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Transportasi Laut
40	Identifikasi Pelaksanaan Terhadap Ratifikasi Konvensi IMO Di Indonesia Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan VIMSAS
41	Penanganan Pengangkutan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Over Dimension dan Over Loading (ODOL)
PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara Dan Pembuatan Hub And Spoke Pengumpul Dan Pengumpan) Bandar Udara Untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik Di Papua Barat
2	Studi Peningkatan Airstrip Ke Status Standar Bandar Udara Di Papua
3	Background Study Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
4	Studi Potensi Untuk Ditetapkannya Lokasi Bandar Udara Perairan Dan Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Perairan (Seaplane) Di Indonesia
5	Penelitian Pengembangan Terhadap Prototype Peralatan Untuk Mendeteksi Wind Shear Di Bandar Udara
6	Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis Penumpang
7	Penelitian Pengembangan Prototype Peralatan Untuk Mengukur Ketinggian Genangan Air (Standing Water) Di Landas Pacu
8	Pengembangan Transshipment Cargo Di Bandara Ngurah Rai Denpasar
9	Kajian Pengaturan Tempat Menginap Pesawat Udara Di Bandar Udara (Home Base) Untuk Pengaturan Rute Penerbangan
10	Kajian Standarisasi Peralatan Navigasi Untuk Bandar Udara Kelas 3 Di Papua
11	Evaluasi Standarisasi Pelatihan Dan Sertifikasi Avsec (Aviation Security)
12	Kajian Pengoperasian Bandar Udara Pondok Cabe Sebagai Hub Pengoperasian Pesawat Turboprop Untuk Penerbangan Jarak Pendek
13	Kajian Smart Airport Untuk Peningkatan Passenger Experience Di Bandara Kualanamu
14	Kajian Pendanaan Infrastruktur Bandar Udara Di Indonesia Melalui Skema Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (Pina)
15	Kajian Bandar Udara Kertajati Sebagai Secondary Airport Dari Bandara Soekarno Hatta
16	Kajian Pengoperasian Helicopter City Transport (Heli-City) Sebagai Transportasi Udara Charter Ditinjau Dari Aspek Keamanan Dan Keselamatan
17	Kajian Pemanfaatan Ruang Bagasi Tercatat Penumpang Pesawat Udara Yang Tidak Terpakai
18	Kajian Regulasi Khusus Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Di Papua Dan Papua Barat
19	Kajian Kebutuhan Fasilitas Training Simulator Pilot Pesawat Udara Commuter Dan Normal Category Untuk Beroperasi Di Papua Dan Papua Barat
20	Kajian Kebutuhan Angkutan Udara Rute Pendek Dengan Pesawat Udara Kategori Komuter Untuk Dioperasikan Sebagai Air Taxi

3.2 REALISASI KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN TEKNIS DAN DUKUNGAN MANAJEMEN LAINNYA

Kegiatan Penelitian di Badan Litbang Perhubungan dapat berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, yaitu meliputi kegiatan penunjang serta pembinaan. Kegiatan pembinaan sumber daya manusia litbang meliputi tenaga fungsional baik tenaga peneliti, perekayasa penelitian, serta kegiatan penunjang yang terkait dengan pengembangan wawasan dan profesionalisme. Sementara kegiatan penunjang penelitian berupa penyediaan sarana dan prasarana. Secara rinci realisasi pencapaian kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya selama kurun waktu 2015-2018 meliputi:

1) Sumber Daya Manusia Badan Litbang Perhubungan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dilakukan melalui promosi jabatan baik fungsional maupun struktural serta berbagai program diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi pegawai Badan Litbang Perhubungan. Diklat dimaksud meliputi diklat penjenjangan/struktural dan diklat teknis fungsional. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM lingkup Badan Litbang Perhubungan, selama kurun waktu 2015-2018 telah dilakukan pengiriman tugas belajar S2 dan S3 baik ke universitas di dalam negeri maupun luar negeri. Secara rinci perkembangan peserta tugas belajar, dan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam peningkatan kompetensi jabatan fungsional peneliti disajikan pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan Peserta Tugas/Ijin Belajar

NO	PROGRAM	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Pendidikan Sarjana (S1)	0	0	0	0
2	Pendidikan Magister (S2)	4	3	1	2
3	Pendidikan Doktor (S3)	1	2	0	0
JUMLAH		5	5	1	2

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, 2018

Tabel 3.3 Perkembangan Peserta Diklat Teknis Jabatan Fungsional Peneliti

NO	Program	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1.	Diklat Peneliti Pertama	0	5	2	0
2.	Diklat Peneliti Lanjutan	0	0	5	1
JUMLAH		0	5	7	1

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, 2018

Di samping pengiriman tugas belajar, diklat jabatan fungsional dan kursus dasar peningkatan kompetensi pegawai, Badan Litbang Perhubungan juga melakukan pengiriman pegawai untuk mengikuti kursus, *training/workshop* baik yang diselenggarakan secara internal Badan Litbang maupun di luar, baik di lingkup dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana terdata dalam Tabel 3.4 di bawah ini:

**Tabel 3.4 Perkembangan Peserta Kursus, Training/Workshop
Dalam dan Luar Negeri Tahun 2015-2018**

NO	Program	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1.	<i>English Basic 1 and 3 Course</i>	45	0	0	0
2.	<i>English conversation and English writing</i>	0	32	0	20
3.	Pelatihan Teknik Presentasi	0	28	21	20
4.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	25	2	2	1
5.	Diklat fungsional bendahara pengeluaran	2	2	1	4
6.	Diklat fungsional peneliti tingkat pertama	0	5	2	0
7.	Diklat metodologi penelitian	0	50	0	20
8.	Pelatihan editor	0	25	0	41
9.	Pelatihan metode penulisan ilmiah	21	50	0	20
10.	Bimtek pengadaan Barang dan Jasa	0	26	0	0
11.	<i>Training on Vissim/Vissum</i>	0	10	28	0
12.	Bimtek SPSE	0	3	0	0
13.	Diklat Keselamatan Transportasi	0	1	0	0
14.	Diklat asiparis	0	3	0	0
15.	Diklat penyusunan Renstra dan LAKIP	0	1	0	0
16.	Diklat SIMAK BMN	0	1	0	0
17.	Diklat Penyusunan Masterplan Pelabuhan	0	30	15	0
18.	Bimtek Feasibility Study	0	10	0	0
19.	Bimtek SID dan DED	0	15	0	0
20.	Pelatihan pengoperasian drone	0	5	0	0
21.	Pelatihan struktur pesawat terbang	0	40	0	0
22.	Pelatihan map info	0	10	0	0
23.	Diklat pembangunan karakter dan kesamaptaan aparatur Kemenhub	0	16	0	0
24.	Diklat Pejabat Pembuat Komitmen	0	1	0	0
25.	Bimtek Penyusunan Per UU	0	1	0	0
26.	Pelatihan aplikasi keuangan pemerintah	10	0	0	0
27.	Diklat perencanaan transportasi	2	0	0	0
28.	Pelatihan masterplan	15	0	0	0
29.	Pelatihan penulisan ilmiah populer	20	0	0	0
30.	Manajemen Stress	0	0	1	1
31.	Manajemen SDM	0	0	2	0
32.	Sistem Keselamatan Transportasi Kendaraan Darat	0	0	28	0
33.	Magang Peneliti di PT.INKA Madiun	0	0	16	21
34.	Magang Peneliti di Proyek Pembangunan LRT Palembang	0	0	28	0
35.	Diklat <i>Autocad</i>	0	0	10	0
36.	Diklat <i>Sketch Up</i>	0	0	10	0
37.	Diklat Bahasa Korea	0	0	1	0
38.	Pelatihan <i>Software</i> Mapinfo	0	0	12	0
39.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Assesor</i>	0	0	2	2
40.	<i>The Profesional Training Program On Railway Policy and Safety for ASEAN</i>	0	0	2	0
41.	<i>Basic Aircraft Training;</i>	0	0	16	0
42.	<i>Basic Aviation Knowledge Training;</i>	0	0	16	0
43.	<i>Aviation Security and Dangerous Goods Training;</i>	0	0	12	0
44.	<i>Human Factors, Safety Assessment, Realibility and Maintainability Training.</i>	0	0	14	0
45.	Ujian Dinas Tahun 2017	0	0	3	0
46.	FIATA Diploma Freight Forwarding (Pelatihan Lanjutan Basic Freight Forwarding)	0	0	0	4
47.	Basic Freight Forwarding (UN-ESCAP Standard) Angkatan 106	0	0	0	5
48.	Pelatihan Kompilasi Data Seluler dan Pengolahan Data	0	0	0	40

NO	Program	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
	Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional				
49	Diklat Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	0	0	0	19
50	Pendidikan dan Pelatihan Aerodrome (Bandar Udara)	0	0	0	19
51	Pendidikan dan Pelatihan Navigasi Penerbangan	0	0	0	19
52	Pendidikan dan Pelatihan Airside Airport Safety	0	0	0	20
53	Diklat "Ground Handling Management"	0	0	0	2
54	Diklat PIM III	0	0	0	1
55	Diklat "Cargo Skills and Procedures"	0	0	0	4
56	Reform Leadership Training	0	0	0	1
57	Diklat Pembinaan Purna Bakti	0	0	0	4
58	Penyusunan Dokumen SPIP Tingkat Pelaksana	0	0	0	6
59	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen SPIP Tingkat Manajerial dan Pelaksana	0	0	0	51
60	Administrasi Perkantoran	0	0	0	1
61	Training Standar Sertifikasi Rancang Bangun Pesawat Udara	0	0	0	19
62	Training Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation	0	0	0	1
63	Diklat Teknis Dasar Transportasi Darat	0	0	0	30
64	Pelatihan Bahasa Indonesia	0	0	0	25
65	Diklat Fungsional Peneliti Lanjutan	0	0	0	1
66	Perancang Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	2
67	Analisis Kepegawaian Terampil	0	0	0	1
68	Bimbingan Teknis IT Environment Management System (EMS)	0	0	0	3
69	Pengisian Aplikasi e-LHKPN	0	0	0	38
70	Pengisian Aplikasi Capaian Kinerja	0	0	0	14
71	Pengisian Aplikasi SMART	0	0	0	28
72	Operator Hawkeye	0	0	0	15
73	Bimbingan Teknis Pengembangan Open Journal System	0	0	0	25
74	Magang Peneliti di PLS Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah	0	0	0	28
75	Pengembangan Motivasi Pegawai Pegawai Badan Litbang Perhubungan	0	0	0	255
76	Capacity Building Pegawai Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	0	45
77	Capacity Building Pegawai Puslitbang Transportasi Antarmoda	0	0	0	40
78	Capacity Building Pegawai Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	0	0	0	54
	JUMLAH	138	367	242	989

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, 2018

2) Kegiatan Seminar/Workshop/Roundtable Discussion/Focus Group Discussion/Temu Karya Peneliti

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan pokok Badan Litbang Perhubungan, dan dalam rangka *transfer of knowledge* bagi para peneliti maka telah dilakukan kegiatan seminar/lokakarya/ceramah ilmiah/dan temu karya peneliti.

Tabel 3.5 Kegiatan Seminar/Workshop/Roundtable Discussion/Focus Group Discussion/Temu Karya Peneliti

SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2015	
LINTAS SEKTORAL	
1	Seminar Internasional “ <i>Environmentally Sustainable Transport</i> ”
BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA	
1	Workshop discussion “Pedoman Penyusunan Rencana Induk”
2	Workshop discussion “Implementasi SKKNI Transportasi Multimoda Subbidang Pengurusan Pengangkutan dalam Penyelenggaraan Angkutan Barang”
3	Workshop discussion “Pemanfaatan Data Seluler Sebagai Basis Data Pergerakan Orang”.
4	Workshop discussion “Kebijakan Penerapan Environmentally Sustainable Transport (EST) Perkotaan di Indonesia”.
5	Workshop discussion “ Paparan Dirjen Perkeretaapian dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
6	Workshop discussion “Paparan Dirjen Perhubungan Darat dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
7	Workshop discussion “Paparan Dirjen Perhubungan Udara dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
8	Workshop discussion “Paparan Dirjen Perhubungan Laut dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”
9	Workshop discussion “ Paparan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Diskusi Kesiapan Evaluasi Kemanfaatan Investasi 2016”.
BIDANG TRANSPORTASI DARAT	
1	Workshop discussion “Uji Publik Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Standar Pelayanan Minimum Kereta Api
2	Workshop discussion “Singapore Experience In Graining Public Acceptance of ERP
3	Workshop discussion “Penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek”
4	Workshop discussion “General Lecture Dr. Chandra “Competition Between Cities A Toll Setting Game With Experimental Result
5	Workshop discussion “Penerapan Dan Pengembangan Light Rail Transit (LRT) Di Indonesia”
6	Workshop discussion “Pengembangan Angkutan Massal Yang Terintegrasi Di Jabodetabek”
7	Workshop discussion “Pemodelan Transportasi Jabodetabek Dengan Menggunakan Software Mars”
8	Workshop discussion “Review Rencana induk Transportasi Jalan Dan Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP)”
9	Workshop discussion “Review Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS)
10	Workshop discussion “Pembahasan Rencana Induk Transportasi Di Wilayah Aglomerasi”
11	Strategi Pembangunan Dan Pengembangan BRT Di Kota Metropolitan Dan Kota Besar Secara Efektif Dan Efisien”
BIDANG TRANSPORTASI LAUT	
1	Workshop discussion “Uji Publik Terhadap Konsep Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penumpang Angkutan Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan”
2	Workshop discussion “Reviuw Rencana Induk Pelabuhan Nasional”
3	Workshop discussion “Masterplan Pelabuhan Laut Bicoli dan Tapaleo”
4	Workshop discussion “Framework For Strengthening Container Shipping Connectivity to Implement a Marine Highway System in Indonesia”
5	Workshop discussion “Pengembangan Angkutan Air dalam Mendukung Pengembangan Kawasan MIFFE di Merauke”
6	Workshop discussion “Pemodelan Indonesia Container Model”
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Workshop discussion “Pemanfaatan <i>Multi User Check In</i> Untuk Berbagai Moda Transportasi (Darat,

	LAut, Perkeretaapian, Dan Udara)”
2	Workshop discussion “Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri (Local Content) Dalam Rancang Bangun Pesawat Produk Indonesia”
SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2016	
LINTAS SEKTORAL	
1	Focus Group Discussion “Reviu Rencana Induk Transportasi”
2	Focus Group Discussion “Keikutsertaan Indonesia dalam <i>Trans-Pacific Partnership</i> Tahun 2016”
3	Focus Group Discussion “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2016”
4	Focus Group Discussion “Menuju Angkutan Barang dan Logistik Yang Berwawasan Lingkungan”
5	Focus Group Discussion “Sosialisasi Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI)”
BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI MULTIMODA	
1	Focus Group Discussion “Pengembangan E-Gudang Dalam Rangka Kelancaran Arus Barang”
2	Focus Group Discussion “Integrasi Rencana Pengembangan Tranportasi Tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota”
3	Sosialisasi “Persiapan Pelaksanaan Survei ATTN Barang Tahun 2016”
BIDANG TRANSPORTASIJALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Focus Group Discussion “Antisipasi Kemacetan Pada Waktu Libur Panjang”
2	Focus Group Discussion “Integrasi Area Traffic Control System (ATCS) di Jabodetabek”
3	Focus Group Discussion “Pengembangan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Indonesia”
4	Focus Group Discussion “Implementasi Sistem Pencegahan Pelanggaran Sinyal kereta Api dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian”
5	Focus Group Discussion “Rencana Pengembangan Pelayanan Angkutan Pemukiman di Wilayah Jabodetabek”
6	Focus Group Discussion “Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Jalan Jabodetabek”
7	Focus Group Discussion “Implementasi Transjabodetabek Ekspres”
8	Focus Group Discussion “Review Kinerja Prasarana Terminal Penumpang di Jabodetabek dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H”
9	Focus Group Discussion “Penyusunan Pelayanan Angkutan Bandar Udara”
10	Focus Group Discussion “Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)”
11	Focus Group Discussion “Redistribusi Fungsi Lahan di Jabodetabek”
12	Focus Group Discussion “Pengembangan Keterpaduan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek”
BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN	
1	Focus Group Discussion “Sertifikat Keahlian Pelaut”
2	Focus Group Discussion “Review Rencana Induk Pelabuhan”
3	Focus Group Discussion “Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Laut”
4	Kegiatan Diseminasi “Hasil Penelitian Masterplan Pelabuhan Laut Kabisadar, Saparua/Haria, Tulehu, Hatupiru, Tehoru, Bemo, Ilath, Manipa, Hitu, Kairatu, Wayauwa, Dan Saketa, Serta Studi Masterplan Terminal Penyeberangan Wahai, Ambalau, Namrole, Luhu, Ohoiraut, & Elat”
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Focus Group Discussion “Pengembangan Bandar Udara Wirasaba Dalam Rangka Menunjang Konektifitas Berbasis Turboprop di Pulau Jawa”
2	Focus Group Discussion “Pemilihan Type Pesawat Udara dan Pembuatan Hub and Spoke (Pengumpul dan Pengumpan) Bandar Udara Untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Provinsi Papua”
SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2017	
LINTAS SEKTORAL	
1	Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis Sistranas (Pembahasan di Wilayah Indonesia Timur)
2	<i>Unlocking Investment for Climate Actions in the Transport Sector</i>
3	Seminar FKK Penguatan Kapasitas dan Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Inovasi Pembangunan Infrastruktur Guna Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional

BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) Orang Tahun 2017
2	Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional (ATTN) Orang Tahun 2017
3	Review Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 Terkait Evaluasi Kemanfaatan
4	Pengembangan Indikator Kinerja Integrasi Transportasi Antarmoda
5	Arah Kebijakan Transportasi Antarmoda dalam Mendukung Sistem Transportasi Nasional
6	Pengembangan Sistem Transportasi Nasional Dalam Mendukung Pelayanan Angkutan Barang Yang Efisien
BIDANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2017
2	Kajian Teknis Pembangunan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) di Podomoro Golf View Cimanggis
3	<i>Smart Mobility and Smart Infrastructure</i>
4	Peran Angkutan Pedesaan dalam Sistem Transportasi Nasional
5	Reviu Peraturan Menteri Perhubungan Pengganti PM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
6	Pembangunan Perkeretaapian: Tantangan dan Peluang
7	Uji Simulasi <i>Crashworthiness</i> pada Rancang Bangun Karoseri Kendaraan Penumpang di Indonesia
BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Pemberdayaan Pelayaran Rakyat Dalam Menunjang Transportasi Laut
2	Arah Kebijakan Pengembangan Transportasi Laut Dalam Mendukung Sistem Transportasi Nasional
3	Peran Angkutan Sungai Dan Danau dalam Mendukung Angkutan Pedalaman
4	Desain Kapal <i>Feeder</i> Untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	Peningkatan Keselamatan Transportasi "Mencari Solusi Terhadap <i>Accident</i> dan <i>Serious Incident</i> Transportasi Udara
2	Studi Pemilihan Tipe Pesawat Udara dan Pembuatan <i>Hub and Spoke</i> (Pengumpul dan Pengumpan) Bandar Udara Untuk Penurunan Disparitas Harga Logistik di Papua
3	Pola Kerja Sama Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan BUMN/Swasta
4	Kebijakan Transportasi Udara dalam Mendukung Sistem Transportasi Nasional
SEMINAR/ROUNDTABLE DISCUSSION/FOCUS GROUP DISCUSSION 2018	
LINTAS SEKTORAL	
1	FGD Persiapan <i>Workshop Digital Transportation</i>
2	<i>Workshop Digital Transportation</i>
3	Rakornis Tantangan Penelitian dan Pengembangan di Era Digitalisasi dan <i>Big Data</i> untuk Meningkatkan Kinerja Transportasi
BIDANG TRANSPORTASI ANTARMODA	
1	FGD Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Transportasi Antarmoda di Era Digitalisasi
2	Standarisasi Distribusi Logistik Domestik
3	Optimalisasi Integrasi Transportasi di Bandara Soekarno-Hatta
4	Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi
5	Efektivitas Penerapan Sistem <i>MLFF (Multi Lane Free-Flow)</i> di jalan tol
6	Pemanfaatan <i>Mobile Positioning Data</i> Untuk Analisis Ekonomi
BIDANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN	
1	Inovasi Teknologi Kendaraan Angkutan Barang untuk Mengurangi Kerusakan Jalan Akibat Kelebihan Muatan
2	Inovasi Teknologi Pemantauan Pergerakan Tanah di Sekitar Rel Kereta Api
3	Strategi Pengembangan Teknologi dan Industri di Bidang Perkeretaapian
4	Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5	Efektivitas Penerapan Kebijakan Ganjil Genap

6	Penerapan e-Tilang Bagi Kendaraan Angkutan barang Guna Mewujudkan Keselamatan Transportasi Jalan
7	Peluang Tantangan Penerapan <i>WIM (Weigh In Motion)</i> Untuk Mendukung Kebijakan <i>Over Dimension Over Loading (ODOL)</i>
8	Peluang dan Tantangan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Transportasi Jalan Sebagai Perumus Kebijakan Di Sektor Transportasi Jalan
BIDANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	
1	Peran Transportasi Laut Untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
2	Tingkat Kesiapan Komponen Dalam Negeri (TKDN) Untuk Mendukung Pembangunan dan Perekayasaan Saran Angkutan Maritim
BIDANG TRANSPORTASI UDARA	
1	FGD Pengawasan Keamanan terhadap Pemanfaatan Ruang Bagasi tercatat Penumpang Pesawat Udara yang Tidak Terpakai
2	Optimalisasi Pengoperasian Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati
3	Pengembangan <i>Transshipment Cargo</i> Udara di bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar - Bali
TEMU KARYA PENELITI 2015	
1	Pedoman Teknis Pemanfaatan Keterpaduan Kepelabuhan dengan Penyeberangan
2	Basic Design Pesawat Latih Flying School dengan Meningkatkan Kandungan Lokal
3	Pedoman Umum Perancangan Integrasi Stasiun Kereta Api
4	Alternatif Desain Penataan Perlintasan Sebidang di Indonesia
TEMU KARYA PENELITI 2016	
1	Analisis Kebijakan Transportasi Multimoda Dalam Rangka Mengurangi Disparitas Harga Antar Wilayah
2	Evaluasi Pelayanan Angkutan Lanjutan Masa Lebaran Tahun 2015 di Pelabuhan Penyeberangan Merak
3	Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kota Salatiga
4	<i>Impact Of Fuel Subsidy Remval on Stated Preference To Mass Rapid Transit (MRT)</i>
5	Penelitian Kebutuhan Fasilitas Kapal Penumpang Berdasarkan Gender di Balikpapan
6	Evaluasi Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Amurang di Minahasa Selatan
7	Evaluasi Kinerja Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi
8	Perencanaan Pengembangan Runway dan Taxiway Bandar Udara Juwata-Tarakan
9	Penentuan Lokasi Simpul Integrasi Jaringan Kereta Api dan BRT di Bandara Syamsudin Noor
10	Rencana Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di Kota Kediri, Jawa Timur
11	Desain Kapal Feeder Tol Laut Trayek T-5
12	Kesediaan Calon Pengguna Trem/Light Rapid Transport (LRT) di Yogyakarta Dengan Metode Random Parameter Bivariate Ordered Probit
13	Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Kota di Kota Banjarbaru
14	Upaya Peningkatan Konektivitas Angkutan Laut di Wilayah Maluku
15	Pemenuhan Kualitas Pelayanan di Bandara Haji Hasan Aroeboesman Ende Untuk Meningkatkan Kepuasan Penumpang
TEMU KARYA PENELITI 2017	
1	Pembuatan <i>Prototype</i> Alat Penghitungan <i>Track Access Charge (TAC)</i> Pada Prasarana Kereta Api Dengan Menggunakan Sensor Infra Merah;
2	Integrasi Pelayanan Penumpang di Simpul Transportasi Merak;
3	Optimalisasi Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo Melalui Peningkatan Konektivitas Antara Solo - Yogyakarta Dengan Angkutan Kereta Api Khusus Bandar Udara; dan
4	Konsepsi Tol Laut dan Studi Kasus Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut
TEMU KARYA PENELITI 2018	
1	Pembangunan Pelabuhan Sokoi Kuala Kampar Kab. Pelalawan
2	Integrasi Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan Halte Angkutan Umum dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi
3	Kajian Desain Aplikasi Sistem Integrasi Pembayaran Kereta Api Perkotaan

4	Perencanaan Jalur Sepeda Kota Blitar
5	Optimalisasi Ketersediaan Tempat Duduk (<i>Seat Capacity</i>) Angkut Udara pada Masa Lebaran dengan Pendekatan <i>Potential Demand</i> Berbasis <i>Big Data</i>
6	Pengoperasian Kapal Ro-Ro untuk Penyeberangan Lintas Jakarta-Panjang
7	Implementasi National Single Window (NSW-Airportnet) di Bandara

3.3 REALISASI KINERJA KEUANGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2015 - 2019

Kebutuhan anggaran dan pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan tahun 2015 - 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Target Anggaran dan Pagu Anggaran
Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Renstra	Realisasi	Prosentase Realisasi
2015	228.259.100.000	228.259.100.000	100%
2016	240,359,160,250	206.259.234.000	85,813%
2017	251,107,216,313	116.194.398.000	46,273%
2018	143.830.906.000	143.830.906.000	100%
2019	138.253.242.000		

Sumber: Badan Litbang Perhubungan, Tahun 2019

Kebutuhan anggaran Badan Litbang Perhubungan mengalami peningkatan pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan rutin 5 tahunan, yaitu kegiatan survei Asal Tujuan Transportasi Nasional Angkutan Barang yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

4.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TRANSPORTASI

4.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Transportasi Nasional

Sejalan dengan visi pembangunan “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 terdapat dua isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pembangunan transportasi, yaitu:

Isu Strategis 1: Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

Isu Strategis 2: Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

4.1.2 Agenda Riset Nasional

Berdasarkan Agenda Riset Nasional (ARN) periode 2015-2019, agenda riset ke depan akan mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya menjadi produk yang berdaya saing. Fokus riset akan dibagi ke dalam dua prioritas, yaitu Prioritas Riset Nasional dan Prioritas Riset Bidang Fokus. Prioritas Riset Nasional memfokuskan kepada 3 bidang fokus, yaitu *Food, Energy dan Water* (FEW). Sedangkan, Prioritas Riset Bidang Fokus akan difokuskan kepada 7 bidang fokus, yaitu Teknologi Pangan, Teknologi Energi, Teknologi Kesehatan dan Obat, Teknologi Transportasi, Teknologi Hankam, dan Material Maju.

Riset di bidang transportasi perlu didukung oleh riset pada bidang-bidang lainnya, seperti (a) sains dasar terutama terkait simulasi dan pemodelan, (b) teknologi informasi, (c) energi dan lingkungan hidup dalam rangka penggunaan energi alternatif dan minimisasi dampak lingkungan, (d) material maju dalam pengembangan komponen sarana dan prasarana transportasi serta (e) sosial kemanusiaan terkait perilaku bertransportasi dan memenuhi permintaan masyarakat. Selanjutnya dirumuskan kegiatan penelitian untuk menjawab tantangan dan permasalahan di sektor perhubungan, meliputi:

1. Membangun Konektivitas Nasional;
2. Membangun Industri Transportasi yang Efisien dan Berdaya Saing Tinggi;
3. Melakukan Internalisasi dan Integrasi Isu-isu Strategis Lintas Sektor; dan
4. Mewujudkan Transportasi Perkotaan yang Modern, Efisien dan Berkeadilan.

Berdasarkan rumusan di atas, riset pengembangan dan kerekayasaan bidang transportasi difokuskan pada 5 tema utama, yaitu:

1. Sistem Transportasi untuk Konektivitas Nasional;
2. Teknologi dan Manajemen Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
3. Klaster Industri Moda Transportasi;
4. Transportasi untuk Maritim;
5. Riset Pendukung Transportasi.

4.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan ditetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, dengan arah kebijakan Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, melalui strategi antara lain :
 - a. Peningkatan konektivitas antar wilayah
 - b. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda
 - c. Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia
2. Sasaran meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, melalui strategi antara lain :
 - a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi
 - b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi
 - c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini
 - d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi
 - f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan

- g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
 - h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya
 - i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah
 - j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan
 - k. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi
 - l. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi
 - m. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang
 - n. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll)
3. Sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :
- a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute
 - b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender
 - d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan
 - e. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara *real time*, penerapan ATCS dan Virtual Mobility
 - f. Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi
4. Sasaran Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, melalui strategi antara lain :
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan *outcomes*
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta
 - d. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif
 - e. Pengembangan BRT

- f. Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel
 - g. Penyediaan dana subsidi/ PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan
5. Sasaran Meningkatkan Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, dengan arah kebijakan Meningkatkan Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, melalui strategi antara lain :
 - a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar
 - b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana
 - c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan
 6. Sasaran terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, dengan arah kebijakan Melaksanakan Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, melalui strategi antara lain :
 - a. Pemetaan arah / kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi.
 - b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan.
 - c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi.
 - d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi.
 - e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi.
 7. Sasaran terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang Transportasi, melalui strategi antara lain :
 - a. Menyusun Man Power Planning SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan
 Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik

kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis*.

c. Mengembangkan Kualitas dan Kapasitas Diklat SDM Transportasi

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDMP Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDMP Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, strategi lain perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi di bidang transportasi yaitu :

- 1) Perbaikan Kurikulum pada sekolah-sekolah dibawah BPSDMP dengan prosentase pendidikan : 70% praktek dan 30% teori.
- 2) Perbaikan kualitas dosen (pemagangan dan beasiswa S3/S3);
- 3) Mengubah metode pendidikan dengan mengedepankan system pendidikan e-learning, pemanfaatan teknologi informasi, serta membentuk LSP-1;
- 4) Peningkatan kerjasama pendidikan antara BPSDMP dengan Universitas dan lembaga lain;
- 5) Menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.

- d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi
Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi
 - e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan
Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.
Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.
 - f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi
Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.
8. Sasaran Meningkatkan Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, melalui strategi antara lain :
- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung;
 - b. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi;
 - c. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan database penelitian serta perpustakaan dan aplikasi program penelitian;

- d. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian;
 - e. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.
9. Sasaran Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub, melalui strategi antara lain :
 - a. Peningkatan kualitas hasil pengawasan
 - b. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan
 10. Sasaran tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, dengan arah kebijakan Menyediakan SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, melalui strategi antara lain :
 - a. Memberikan pelatihan kompetensi secara rutin dan berkelanjutan kepada seluruh SDM Kementerian perhubungan
 - b. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang terukur
 - c. Melakukan sistem *assessment* dan lelang terbuka untuk promosi dan peningkatan karir
 - d. Memberlakukan sistem *punishment and reward* dalam menilai kinerja dan prestasi SDM
 11. Sasaran terwujudnya *good governance and clean government* di Kemenhub, dengan arah kebijakan Mewujudkan good governance & clean government di Kemenhub, melalui strategi antara lain :
 - a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia)
 - b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses public
 - c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah
 - d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi
 - e. Penerapan *e-government* di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan
 - g. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan *quality assurance*

4.1.4 Arah Kebijakan Badan Litbang Perhubungan

Dalam Renstra 2015-2019 sangat diharapkan Badan Litbang Perhubungan dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan menjadi bahan masukan/rekomendasi penyusunan program/kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan kebijakan sektor transportasi secara luas.

Mengantisipasi perubahan kebijakan nasional transportasi dan program/proyek strategis dalam Renstra Kemenhub 2015-2019 serta melihat kemungkinan implementasi skala penuh atau skala parsial dari beberapa Rencana Induk, Tatanan Nasional, dan Cetak Biru, penelitian transportasi diarahkan kepada dukungan penuh substansi, argumentasi akademik, pedoman teknis (*best practice*), dan dukungan kerangka legal dan kelembagaan terhadap percepatan pembangunan dan reformasi kelembagaan ekonomi transportasi.

Faktor-faktor strategis yang harus dipertimbangkan dalam merancang penelitian transportasi mencakup antara lain kecenderungan perekonomian global, regional, dan nasional serta perekonomian lokal, perkembangan terbaru teknologi transportasi, kondisi demografi, kewilayahan dan kelautan, dan keperintisan. Faktor strategis lainnya termasuk bentuk kelembagaan ekonomi transportasi masa depan, kualitas sumberdaya manusia, dan kolaborasi penelitian lintas subsektor dan lintas sektor.

Badan Litbang Perhubungan selama ini telah berperan dalam melakukan penelitian kebijakan (*policy research*) bidang transportasi dan untuk kedepannya diarahkan pada penelitian terapan (*engineering research*) guna menopang substansi dan kearifan kebijakan sektoral yang akan dijadikan pedoman bagi setiap subsektor perhubungan dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna transportasi. Fokus tema penelitian sebagaimana arah kebijakan transportasi 2015-2019 dapat dikembangkan dari pembaruan kebijakan nasional untuk membangun konektivitas nasional, membangun industri transportasi nasional, membenahi transportasi perkotaan dan perdesaan dan bidang maritim.

Guna mencapai sasaran meningkatnya kualitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, arah kebijakan dan strategis untuk Badan Litbang Perhubungan terbagi menjadi:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung;
2. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi;
3. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan database penelitian serta perpustakaan dan aplikasi program penelitian;
4. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian;
5. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

4.2 PERAN DAN FOKUS KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Berangkat dari Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Badan Litbang Perhubungan selanjutnya ditetapkan peran dan fokus kegiatan Badan Litbang Perhubungan kedepan untuk kurun waktu 2015-2019. Adapun peran Badan Litbang Perhubungan kedepannya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi dan tugas Badan Litbang Perhubungan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan transportasi. Sedangkan fokus kegiatan Badan Litbang Perhubungan meliputi penjabaran peran Badan Litbang Perhubungan terkait dengan fungsi pelayanan Badan Litbang Perhubungan.

4.2.1 Optimalisasi Peran Badan Litbang Perhubungan 2015-2019

Peran Badan Litbang Perhubungan untuk kurun lima tahun kedepan diharapkan dapat dioptimalkan dan diarahkan sebagai:

a. Koordinator penyelenggaraan penelitian di sektor Transportasi.

Adanya perbedaan persepsi dalam mengartikan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait dengan kegiatan penelitian dan pengkajian membutuhkan penegasan peran dan fungsi kelembagaan. Penegasan peran dan fungsi dimaksudkan di sini terkait dengan harmonisasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengkajian di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penegasan peran Badan Litbang Perhubungan tidak menutup kemungkinan sebagai koordinator penyelenggaraan penelitian di sektor transportasi. Dengan demikian seluruh kegiatan penelitian dan pengkajian diharapkan sesuai dengan arah dan kebijakan umum kelitbangan.

Kebutuhan sinergitas penyelenggaraan kegiatan penelitian untuk sektor transportasi tidak hanya berlaku di internal Kementerian Perhubungan tetapi juga bagi lintas kementerian/lembaga penelitian yang melaksanakan penelitian dengan tema sejenis seperti LIPI, Kemenristek, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Adanya duplikasi penelitian tentunya hanya membuang biaya yang seharusnya dapat dihemat. Dengan terkoordinasinya penyelenggaraan penelitian, maka hanya ada satu *Master Plan* yang akan diikuti, sehingga posisi penelitian dapat diketahui sesuai dengan pembagian tugas dan kapasitas serta capaiannya dapat terukur.

b. *Agent of Change* dalam formulasi kebijakan.

Badan Litbang Perhubungan secara berkesinambungan diharapkan tetap dapat menjadi *agent of change* yakni lembaga yang menjadi agen perubahan melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berbasis pada kemampuan nalar dan analisis secara akademis. Dalam hal ini sebagai jembatan antara dunia akademis dan pengambilan keputusan pembangunan. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan memiliki dasar ilmiah (*Evidence based Policy*).

c. *Transport Knowledge Management Center (TKMC)*

Badan Litbang Perhubungan kedepannya diharapkan dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan bidang transportasi (*Transport Knowledge Management Center*). Sebagai lembaga penelitian di bawah Kementerian Perhubungan maka Badan Litbang Perhubungan berpotensi besar sebagai pusat pengetahuan transportasi di Indonesia. Dengan terhimpunnya data transportasi melalui pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai naskah akademis/dasar kebijakan transportasi, kedepannya diharapkan Badan Litbang Perhubungan dapat menjadi rujukan dalam penentuan arah kebijakan dan sumber informasi serta data transportasi yang terpercaya.

d. *Penelitian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)*

Begitu banyak aturan dan pedoman yang harus disusun baik yang merupakan turunan dari undang-undang, peraturan pemerintah yang sudah ada, maupun peraturan internasional. Adanya kebutuhan penyusunan standarisasi untuk setiap moda transportasi, Badan Litbang Perhubungan bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional telah menghasilkan beberapa standar namun masih dalam jumlah yang terbatas..

e. *Pengembangan Penelitian Teknologi*

Kebutuhan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi transportasi merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Litbang Perhubungan dengan segala keterbatasan SDM, sarana dan prasarana. Namun demikian tantangan tersebut harus dapat diatasi dengan cara salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian lain baik lingkup nasional maupun internasional.

Dalam rangka transformasi dari Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Litbang Teknologi Perhubungan perlu dilakukan peningkatan dan pembangunan meliputi fasilitas sarana dan prasarana khususnya untuk melakukan kegiatan penelitian yang terkait dengan teknologi, peningkatan kompetensi SDM peneliti, rekrutmen para calon peneliti dan peneliti yang terbaik dibidangnya dalam mendukung kegiatan penelitian transportasi.

f. *Penyelenggara Survei Reguler secara Nasional.*

Salah satu survei di sektor transportasi yang sangat penting secara nasional dan dilakukan secara periodik adalah survei Asal-Tujuan Perjalanan/*OD* Survei. Survei Asal-Tujuan bertujuan untuk menghimpun data pergerakan penumpang maupun barang secara regular setiap lima tahun sehingga dapat diketahui pola pergerakan baik penumpang maupun barang sebagai dasar penyusunan perencanaan transportasi. Perolehan data Asal-Tujuan dimanfaatkan tidak hanya Untuk mendapatkan data yang representative dan berbiaya murah, dibutuhkan kreatifitas dalam pengumpulan datanya, seperti pemanfaatan BIG DATA, atau bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik dalam pelaksanaan survei. Kinerja

Transportasi perlu diketahui secara Nasional, yang memang akan memakan biaya yang tidak sedikit.

g. Pembina Teknis Penelitian Transportasi

Keterbatasan dana penelitian dan SDM di daerah mendorong Badan Litbang Perhubungan untuk lebih berperan dalam pengabdian masyarakat guna terwujudnya transportasi nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2002 dan KM No. 60 Tahun 2010, dengan harapan pemerintah daerah dapat saling bersinergi untuk pemecahan masalah khususnya pada penyelesaian jangka pendek. Sinergitas penelitian dalam hal ini tidak hanya terbatas pada Pemerintah Daerah tetapi juga dengan K/L litbang dan stakeholder di bidang transportasi. Di sisi lain juga memenuhi tuntutan dari para peneliti litbang perhubungan untuk memproduksi penelitian sebagai bentuk capaian kinerjanya. Berdasarkan permasalahan nyata di lapangan, maka para peneliti di gugah untuk mampu menghasilkan penelitian yang baik dengan hasil yang implementatif.

h. Penyusun Rencana Transportasi Ke depan (*Transportation Planning*).

Mengantisipasi perubahan kebijakan nasional transportasi dan program/proyek strategis dalam RENSTRA 2015-2019 serta melihat kemungkinan implementasi skala penuh atau skala parsial dari beberapa Rencana Induk, Tatanan Nasional, dan Cetak Biru, penelitian transportasi hendaknya diarahkan kepada dukungan penuh substansi, argumentasi akademik, pedoman teknis (*best practice*), dan dukungan kerangka legal dan kelembagaan terhadap percepatan pembangunan dan reformasi kelembagaan ekonomi transportasi dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025.

Faktor-faktor strategis yang harus dipertimbangkan dalam merancang penelitian transportasi mencakup antara lain kecenderungan perekonomian global, regional, dan nasional serta perekonomian lokal, perkembangan terbaru teknologi transportasi, kondisi demografi, kewilayahan dan kelautan, dan keperintisan. Faktor strategis lainnya termasuk bentuk kelembagaan ekonomi transportasi masa depan, kualitas sumberdaya manusia, dan kolaborasi penelitian lintas subsector dan lintas sektor.

Program dan agenda penelitian harus mempunyai kesinambungan, konsistensi akademik, kontekstual, dan dapat dilaksanakan dalam praktek pembuatan kebijakan, perencanaan strategis, dan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi dalam melayani mobilitas.

i. Penyedia data base transportasi

Kementerian Perhubungan telah memiliki unit kerja PUSTIKOM (Pusat Teknologi Komunikasi) yang berfungsi sebagai penyedia layanan data dan informasi transportasi. Adapun Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga penelitian juga memiliki kepentingan yang tinggi terhadap data. Dalam hal ini adalah kebutuhan untuk

menghimpun data base yang tidak hanya bersifat agregat, termasuk data data disagregat yang lebih detail lagi untuk kepentingan penelitian. Karenanya tahun 2013 pembangunan data center mulai direncanakan dengan harapan ke depannya Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga terdepan dalam penyediaan data statistika transportasi.

4.2.2 Fokus Kegiatan Badan Litbang Perhubungan 2015-2019

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi 8 fokus kegiatan strategis Badan Litbang Perhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Perencanaan transportasi;

Badan Litbang Perhubungan telah menyusun dokumen perencanaan yang menjadi kebutuhan dari perencanaan transportasi baik untuk skala nasional, kewilayahan dan lokal. Termasuk penelitian perencanaan turunan dari kebijakan transportasi di atasnya seperti penyusunan masterplan/rencana induk, perencanaan jaringan transportasi, dsb. Beberapa dokumen perencanaan transportasi yang telah disusun oleh Badan Litbang Perhubungan antara lain dokumen perencanaan Sistranas (Sistem Transportasi Nasional), Tatranas (Tataran Transportasi Nasional) dan Tatalok (Tataran Transportasi Lokal).

b. Proposal kebijakan;

Di samping menyusun dokumen perencanaan, Badan Litbang Perhubungan harus bersikap responsif dan aktif atas permasalahan transportasi yang ada, yaitu melalui penyusunan proposal kebijakan sebagai masukan bagi pemerintah baik yang bersifat internal di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun eksternal kepada pemerintah atau lembaga terkait. Beberapa penelitian proposal kebijakan yang telah disusun oleh Badan Litbang Perhubungan tidak hanya terkait dengan sektor transportasi tetapi juga bersifat lintas sektor.

c. Proposal evaluasi;

Badan Litbang Perhubungan juga mempunyai peran untuk melakukan evaluasi atas kebijakan transportasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan bahwa Badan Litbang Perhubungan dapat berperan sebagai penyeimbang atau fasilitator bagi masyarakat, stakeholder maupun operator. Hal ini telah direalisasikan salah satunya melalui penelitian evaluasi kinerja simpul transportasi dan kegiatan evaluasi kemanfaatan pembangunan sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dibiayai APBN.

d. Penyusun Konsep NSPK (Norma Standar Pedoman Kriteria);

Kegiatan penelitian untuk lingkup NSPK yang telah dilakukan Badan Litbang Perhubungan adalah berupa penyusunan naskah akademis dan konsep standardisasi bidang transportasi. Sementara untuk pedoman teknis menjadi kewenangan bagi sub

sektor di Kementerian Perhubungan. Kondisi ini perlu disikapi dengan pembagian kewenangan tugas yang jelas serta partisipasi aktif antara Badan Litbang Perhubungan dan sub sektor khususnya untuk penentuan skala prioritas dalam penyusunan NSPK tersebut.

e. Pelayanan publik;

Terlepas dari peran Badan Litbang Perhubungan kedalam, yaitu untuk lingkup internal Kementerian Perhubungan, Badan Litbang juga memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dalam rangka literasi dan edukasi di bidang transportasi. Layanan tersebut diberikan melalui Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan, *E-Journal* dan *Website*. Peningkatan layanan perpustakaan di tahun 2015 adalah pemanfaatan *E-Library* dan layanan informasi kegiatan litbang serta hasil penelitian transportasi melalui situs www.balitbanghub.dephub.go.id. Sementara itu pelayanan yang bersifat lebih teknis terkait penelitian diberikan melalui fasilitasi klinik transportasi. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam bentuk pendidikan Badan Litbang telah mulai mengadakan lomba penelitian transportasi tingkat Nasional.

f. Klinik Transportasi;

Fungsi dari setiap Pusat Litbang di lingkungan Badan Litbang Perhubungan adalah menjalankan fungsi penyiapan pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan serta informasi ilmiah bidang transportasi multimoda dan/atau antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan serta transportasi udara. Melalui fasilitasi klinik transportasi, yaitu dalam bentuk dukungan penelitian di tingkat Pemerintah Daerah diharapkan peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan untuk pengabdian masyarakat di sektor transportasi dapat lebih ditingkatkan. Hal ini juga sejalan dengan amanat dari UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional.

g. Pengembangan teknologi transportasi;

Pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana serta prasarana untuk mendukung penelitian teknologi sangat dibutuhkan. Di sisi lain penyediaan sarana dan prasarana tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selama ini keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Badan Litbang Perhubungan dapat diatasi melalui melalui kerjasama penelitian lain baik di lingkup nasional maupun internasional. Adapun kerjasama penelitian yang telah dibangun sampai dengan saat ini antara lain dengan: a) LIPI untuk pengembangan pemanfaatan kendaraan listrik sebagai angkutan umum ramah lingkungan; b) BPPT dan *Korea Transport Institute* (KOTI) terkait penelitian konsep regulasi kendaraan listrik; c) KOTI untuk penelitian pengembangan teknologi guna mendukung keselamatan di perlintasan sebidang; d) DENSO terkait penelitian penggunaan Tachograph untuk meningkatkan keselamatan berkendara; dan e) Universitas Diponegoro untuk penelitian penggunaan aplikasi teknologi alat perekam jejak kendaraan bermotor.

h. Penyedia data statistik transportasi.

Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga penelitian memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kebutuhan data. Dalam hal ini termasuk kebutuhan untuk menghimpun data base yang tidak hanya bersifat agregat, termasuk data-data disagregat yang lebih detail lagi untuk kepentingan penelitian. Karenanya tahun 2013 Badan Litbang Perhubungan telah melakukan pembangunan *data warehouse* dengan harapan ke depannya Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga terdepan dalam penyediaan data penelitian transportasi.

4.3 STRATEGI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2015 - 2019

Dalam perjalanannya Badan Litbang Perhubungan telah mengalami perubahan terkait dengan strategi yang akan diterapkan ke depannya untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Strategi Badan Penelitian Perhubungan yang akan diterapkan untuk tahun 2015-2019 adalah strategi **CHANGE**, yaitu terdiri dari *Capacity Building, HARmonisation, Networking, ReGulation and Empowerment*.

1. Capacity Building

a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui perekrutan SDM baru pindahan dari Subsektor atau daerah dan *recruitment fresh Graduate* muda yang mempunyai visi riset dan IPTEK. Rekrutmen baru diharapkan berpendidikan Sarjana atau Magister yang searah dengan pendidikan Sarjananya di bidang teknik jalan, manajemen rekayasa lalu lintas jalan, teknik otomotif, teknik mesin, teknik elektronika, teknik perkapalan, nautika, teknik kepelabuhanan, teknik mesin kapal, tata laksana pelayaran, teknik lingkungan, teknik penerbangan, ahli mesin pesawat, pilot, ATC, elektronika penerbangan, teknik kebandarudaraan, ahli ekonomi transportasi, Matematika, Statistika, dan hukum transportasi.

Para pegawai yang direkrut (S1/S2) atau peneliti dengan jenjang pendidikan S2 harus didorong dan diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan Magister/Doktor di bidang transportasi atau bidang keilmuan pendukung baik yang bersifat teknis maupun sosial. Para calon Peneliti di lingkungan Badan Litbang sesuai bidangnya, wajib magang (*internship*) di perusahaan swasta atau BUMN yang mengelola angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, kepelabuhanan, penerbangan, dan kebandarudaraan, baik di dalam maupun luar negeri agar memiliki pengalaman dan cara pandang yang luas dalam melihat permasalahan transportasi.

b) Pembentukan Dewan Pakar dan Panel Ahli Peneliti Transportasi

Dewan Pakar dan Panel Ahli Peneliti Transportasi terdiri dari para peneliti, praktisi atau ahli transportasi yang ditunjuk dalam rangka mencari solusi berbagai persoalan transportasi di Indonesia. Disamping itu pembentukan dewan pakar dan panel ahli peneliti juga sebagai upaya penguatan SDM peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan

dalam bentuk *transfer of knowledge*. Dewan pakar dan panel ahli transportasi dalam hal ini juga memiliki peran dalam penilaian hasil penelitian dan mitra bestari warta/jurnal penelitian.

2. Harmonisation

Kegiatan kelitbang tidak hanya dilakukan oleh Badan Litbang tetapi juga dapat dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk juga unit litbang lainnya seperti Kemenristek, LIPI, Litbangda, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Kegiatan penelitian sektor transportasi akan lebih terencana dan terlaksana secara berkesinambungan apabila melalui mekanisme terencana dan terpadu.

Seluruh pelaksanaan Penelitian dan pengembangan Teknologi di sektor Transportasi perlu dipantau dan diketahui agar tidak terjadi duplikasi pelaksanaannya. Karenanya diperlukan kesepakatan pelaksanaan penelitian bersama baik melalui kesepakatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan penelitian ataupun melalui peraturan bersama Para Menteri terkait, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Ristek Dikti, Kepala LIPI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Networking

Badan Litbang Perhubungan harus terus membangun kolaborasi penelitian dengan universitas dan lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional untuk mengembangkan riset transportasi. Kerjasama dengan lembaga penelitian internasional diarahkan kepada negara-negara *new emerging economies* dengan karakteristik sosial, ekonomi, demografi, dan politik yang sangat spesifik.

Hal ini didasarkan pada kebutuhan yang riil agar Badan Litbang Perhubungan dapat menjadi lembaga riset yang berkompeten, terpercaya, dan kredibel baik pada tingkatan nasional maupun regional dan global dalam mengambil langkah-langkah didepan untuk pembaruan dan reformasi sektor transportasi. Kegiatan kerjasama penelitian yang dilakukan dalam bentuk *Joint research* dapat dijadikan sarana *bridging* dan *transfer of knowledge* kepada para peneliti. Beberapa lembaga kerjasama yang berpotensi besar untuk dilakukan kerjasama antara lain:

- a) Lembaga Nasional, seperti Ristek, LIPI, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi/Universitas, NGO, Industri, BUMN, dll.
- b) Lembaga Internasional, seperti KOTI (*Korea Transport Institute*), TRL (*The Research Laboratory*), TU DELFT, CLCF (*Centre for Low Carbon Future*), TRB (*The Research Board*), dll.

4. Regulation

Badan Litbang kedepan harus dapat menjadi *leader* atau koordinator di bidang penelitian dan pengembangan teknologi di sektor transportasi. Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan dan sub sektor harus direncanakan dan diawasi secara

bersama-sama, sehingga hasil kegiatan kelitbang dapat dimanfaatkan secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, beberapa peraturan terkait dengan peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan perlu dilakukan tinjau ulang. Selanjutnya perlu disiapkan petunjuk pelaksanaan teknis serta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaannya.

5. *Empowerment*

Kebutuhan penguatan Badan Litbang Perhubungan kedepannya guna mendukung kegiatan penelitian terapan adalah pembangunan unit pelaksana teknis/balai penelitian dan pengembangan teknologi perhubungan dan kebutuhan akan penyediaan database transportasi.

a) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perhubungan

Dalam jangka pendek, konsentrasi kegiatan penelitian Badan Litbang Perhubungan, tetap diarahkan pada kegiatan penelitian untuk mendukung kebijakan transportasi, sedangkan dalam jangka menengah secara bertahap dengan tersedianya sumber daya manusia peneliti yang memadai baik jumlah maupun kualitas di bidang teknologi transportasi, maka kegiatan penelitian diarahkan secara berimbang di bidang kebijakan dan rekayasa teknologi transportasi, dengan membangun laboratorium atau Balai-Balai Teknologi di bidang transportasi jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan.

b) Pembangunan Database Penelitian Transportasi yang Terintegrasi atau ITDB (*Integrated Transport Data Base*)

Pembangunan database dimaksudkan untuk membangun sistem dalam rangka menghimpun data dasar transportasi baik berupa data statistik maupun hasil survai penelitian untuk dijadikan sebagai data dasar dalam untuk pengambilan kebijakan sekaligus untuk meningkatkan kehandalan pada evaluasi kebijakan perencanaan transportasi secara nasional. Pembangunan database harus didukung oleh SDM dengan kompetensi yang mumpuni di bidang Informasi Teknologi (IT) serta agar dapat berjalan lebih efektif harus dibentuk struktur organisasi dengan anggaran yang terpisah dari kegiatan rutin lainnya.

4.4 KERANGKA REGULASI

Kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan penelitian untuk menjawab permasalahan transportasi yang semakin kompleks serta kebutuhan penyediaan kebijakan transportasi kedepan membutuhkan peran Badan Litbang Perhubungan dengan kewenangan yang lebih luas. Transformasi peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kelengkapan regulasi dan kelembagaan pendukung sebagai penguatan peningkatan peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan kedepannya. Terlebih lagi dengan adanya tuntutan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas layanan publik antara lain melalui peningkatan kepercayaan terhadap pemanfaatan produk litbang. Salah satu wujud peningkatan kepercayaan, yaitu melalui penetapan kebijakan melalui regulasi yang mendorong optimalisasi peran penting Badan Litbang Perhubungan terkait dengan posisinya dalam proses perencanaan kebijakan transportasi. Kebutuhan dukungan regulasi untuk penguatan peran dan optimalisasi kinerja Badan Litbang Perhubungan bersumber baik dari luar unit kerja Badan Litbang Perhubungan maupun lingkungan internal Badan Litbang Perhubungan terkait peningkatan kelengkapan regulasi untuk kegiatan operasional kelitbang.

Langkah awal upaya transformasi peran dan fungsi Badan Litbang Perhubungan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 yang ditandai dengan penetapan Perpres Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2015 pada Pasal 24 dan Pasal 25 adalah:

Tugas Pokok Badan Litbang Perhubungan:

Menyelenggarakan Penelitian Dan Pengembangan di Bidang Transportasi

Fungsi Badan Litbang Perhubungan:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka memenuhi amanat kebijakan penelitian nasional untuk mengoptimalkan peran lembaga penelitian, maka Badan Litbang Perhubungan membutuhkan kerangka regulasi meliputi:

1. Penguatan peran, fungsi dan kewenangan Badan Litbang Perhubungan dalam penyusunan perumusan kebijakan transportasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui revisi KM No 60 Tahun 2010 sebagai turunan dari Perpres Nomor 40 Tahun 2015.
2. Kelengkapan dan tinjau ulang kerangka regulasi terkait kegiatan operasional kelitbang di internal Badan Litbang Perhubungan.

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Badan Litbang Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan dari sasaran startegis, dengan uraian detail sebagai berikut :

Sasaran Strategis pertama (SS1) berupa Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi dengan Indikator Kinerja :

- 1) Prosentase penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan dengan target capaian tahun 2019 sebesar 80%.
- 2) Prosentase pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2), t adalah tahun IKU dengan target capaian tahun 2019 sebesar 80%.

5.2 KERANGKA PENDANAAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2015-2019

Sebagai lembaga negara di bawah naungan Kementerian Perhubungan, pembiayaan penelitian dan pengembangan Badan Litbang Perhubungan bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA. Kepastian adanya pembiayaan ini merupakan landasan yang kuat bagi Badan Litbang Perhubungan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Walaupun masih relatif kecil, jumlah dana yang dialokasikan ke Badan Litbang Perhubungan secara nominal cenderung naik dari tahun ke tahun. Pendanaan Badan Litbang Perhubungan terbagi menjadi anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transportasi yang merupakan kegiatan utama Badan Litbang Perhubungan dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya.

Dalam hal penggalian sumber dana lain di luar APBN, paradigma baru yang timbul akibat penerapan UU No. 18 Tahun 2002, adalah: (a) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga tingkat pusat dan lembaga tingkat daerah digalakkan; (b) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga publik dan lembaga swasta dirangsang; (c) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga nasional dan internasional diberi porsi lebih besar. Berdasarkan pengalaman di tahun 2014, Badan Litbang Perhubungan telah merasakan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian. Yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian kerjasama kedepannya adalah mekanisme penganggaran diantara kedua belah pihak atau beberapa pihak.

Dampak positif dari kerjasama tersebut antara lain adalah adanya sumber pendanaan di luar APBN yang apabila dapat dikelola dengan baik secara mandiri dapat memberikan dorongan bagi perkembangan litbang perhubungan. Namun demikian, penerapan UU No. 18 Tahun 2002 khususnya dalam hal pemanfaatan secara langsung pendapatan dari hasil komersialisasi

teknologi masih perlu diperjuangkan. Pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2015-2019 seluruhnya terpusat di Kantor Pusat Badan Litbang Perhubungan di DKI Jakarta. Secara rinci Tabel Indikasi Pendanaan dan Kegiatan dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan 2015 – 2019 disampaikan dalam **lampiran I**.

LAMPIRAN I

Tabel Indikasi Pendanaan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM/ STRATEGIS	KEGIATAN	2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL ANGGARAN 2015-2019 (Rp)	INDIKASI
			INDIKASI ANGGARAN (Rp)	TARGET										
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN			Rp 228,259,100,000	377	Rp 240,359,160,250	330	Rp 251,107,216,313	332	Rp 143.830.906.000	236	Rp 138.253.242.000	228	Rp 1.001.809.624.563	
A.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN		Rp 102,072,762,000	226	Rp 117,713,774,700	201	Rp 122,351,962,985	203	Rp 93.827.074.000	172	Rp 92.917.926.000	141	Rp 528.883.499.685	
1	Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda		Rp 23,207,295,000	41	Rp 35,612,439,000	32	Rp 36,294,500,000	32	Rp 26.807.107.000	23	Rp 22.258.612.000	40	Rp 144.179.953.000	
	a	Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan)	Rp 2,033,754,000	10	Rp 2,769,635,000	10	Rp 2,859,500,000	10	Rp 8.249.443.000	17	Rp 9.643.505.000	24	Rp 25.555.837.000	
	b	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)	Rp 21,173,541,000	31	Rp 32,842,804,000	22	Rp 33,435,000,000	22	Rp 18.557.664.000	6	Rp 12.615.107.000	16	Rp 118.624.116.000	
2	Penelitian dan Pengembangan Darat dan Perkeretaapian		Rp 29,099,039,000	79	Rp 33,609,385,000	73	Rp 35,140,917,000	75	Rp 21.649.019.000	53	Rp 20.934.547.000	31	Rp 140.432.907.000	
	a	Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan)	Rp 2,959,427,000	13	Rp 5,082,501,000	13	Rp 5,330,322,000	13	Rp 12.035.768.000	4	Rp 12.048.904.000	20	Rp 37.456.922.000	
	b	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)	Rp 26,139,612,000	66	Rp 28,526,884,000	60	Rp 29,810,595,000	62	Rp 9.613.251.000	50	Rp 8.885.643.000	11	Rp 102.975.985.000	
3	Penelitian dan Pengembangan Laut		Rp 20,733,625,000	44	Rp 17,507,511,000	36	Rp 18,382,885,000	36	Rp 22.348.059.000	39	Rp 28.583.346.000	37	Rp 107.555.426.000	
	a	Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan)	Rp 1,514,233,000	8	Rp 1,589,944,000	8	Rp 1,669,440,000	8	Rp 10.125.749.000	22	Rp 9.476.071.000	18	Rp 24.375.437.000	
	b	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)	Rp 19,219,392,000	36	Rp 15,917,567,000	28	Rp 16,713,445,000	28	Rp 12.222.310.000	17	Rp 19.107.275.000	19	Rp 83.179.989.000	
4	Penelitian dan Pengembangan Udara		Rp 21,482,169,000	50	Rp 23,056,274,000	48	Rp 24,209,087,000	48	Rp 23.022.889.000	57	Rp 21.141.421.000	33	Rp 112.911.840.000	
	a	Jumlah Penyusunan Laporan Program, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan (laporan)	Rp 2,204,606,000	10	Rp 2,314,835,000	10	Rp 2,430,577,000	10	Rp 10.968.986.000	22	Rp 8.374.190.000	18	Rp 26.293.194.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	2015		2016		2017		2018			2019			TOTAL ANGGARAN 2015-2019 (Rp)	INDIKASI
		INDIKASI (Rp)	ANGGARAN TARGET	INDIKASI (Rp)	ANGGARAN TARGET	INDIKASI (Rp)	ANGGARAN TARGET	INDIKASI (Rp)	ANGGARAN TARGET	INDIKASI (Rp)	ANGGARAN TARGET				
	b	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Transportasi (laporan)	Rp 19,277,563,000	40	Rp 20,741,439,000	38	Rp 21,778,510,000	38	Rp 12.053.903.000	34	Rp 12.767.231.000	16	Rp 86.618.646.000		
B.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA	Rp 126,186,338,000	151	Rp 122,645,385,550	129	Rp 128,755,253,328	129	Rp 50.003.832.000	64	Rp 45.335.316.000	87	Rp 472.926.124.878			
1	Peningkatan Akses ke Sumber Informasi IPTEK Transportasi	Rp 104,790,648,000	102	Rp 99,777,908,300	82	Rp 104,798,739,115	82	Rp 44.987.778.000	48	Rp 40.730.877.000	65	Rp 395.085.950.415			
	Penyusunan Updating Data dan Informasi (laporan)	Rp 10,894,696,000	17	Rp 4,290,227,850	14	Rp 4,485,182,793	14	Rp 3.216.111.000	18	Rp 4.914.351.000	19	Rp 27.800.568.643			
	Peningkatan Kapasitas Pegawai (paket)	Rp 11,374,671,000	1	Rp 12,005,408,600	1	Rp 12,690,804,530	1	Rp 3.279.806.000	1	Rp 5.087.713.000	24	Rp 44.438.403.130			
	Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (laporan)	Rp 9,698,972,000	58	Rp 10,612,354,900	41	Rp 11,135,018,145	41	Rp 1.451.682.000	21	Rp 3.392.485.000	8	Rp 36.290.512.045			
	Tata Kelola Kepegawaian (laporan)	Rp 1,878,346,000	8	Rp 2,412,075,000	8	Rp 2,506,247,050	8	Rp 2.082.881.000	2	Rp 432.371.000	3	Rp 9.311.920.050			
	Layanan Perkantoran (bulan)	Rp 44,887,229,000	12	Rp 48,205,898,100	12	Rp 50,769,582,255	12	Rp 25.478.681.000	3	Rp 8.668.509.000	9	Rp 178.009.899.355			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang (unit)	Rp 22,420,277,000	5	Rp 18,433,664,000	5	Rp 19,202,710,500	5	Rp 399.983.000	2	Rp 10.248.232.000	1	Rp 70.704.866.500			
	Gedung / Bangunan (paket)	Rp 3,636,457,000	1	Rp 3,818,279,850	1	Rp 4,009,193,843	1	Rp 9.078.634.000	1	Rp 7.987.216.000	1	Rp 28.529.780.693			
2	Peningkatan Informasi dan Publikasi Hasil Litbang	Rp 21,395,690,000	49	Rp 22,867,477,250	47	Rp 23,956,514,213	47	Rp 5.016.054.000	16	Rp 4.604.439.000	22	Rp 77.840.174.463			
	Dukungan Publikasi Litbang (paket)	Rp 13,543,762,000	5	Rp 14,765,258,800	5	Rp 15,475,060,190	5	Rp 1.038.924.000	7	Rp 3.035.469.000	8	Rp 47.858.473.990			
	Penyelenggaraan Workshop/ Seminar/ FGD/ Rakor (laporan)	Rp 7,851,928,000	44	Rp 8,102,218,450	42	Rp 8,481,454,023	42	Rp 3.977.130.000	9	Rp 1.568.970.000	14	Rp 29.981.700.473			

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Sasaran Strategis Program	Indikator Sasaran	INDIKATOR KINERJA		Satuan	2019
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi	Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian untuk perumusan kebijakan strategis dan teknologi di bidang transportasi	1	Prosentase penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	%	80
		2	Prosentase pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2), t adalah tahun IKU	%	80

LAMPIRAN III

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SEKRETARIAT BADAN LITBANG			Satuan	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi	Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perhubungan	1	Jumlah kebijakan internal Badan Litbang Perhubungan yang dihasilkan	12	Jumlah	Jumlah kebijakan internal yang telah disusun
		Meningkatnya efektivitas akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perhubungan	2	Nilai SAKIP Balitbang	80	Nilai	Perolehan hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
		Tersedianya SDM Badan Litbang Perhubungan yang kompeten dan profesional	3	Jumlah SDM Balitbang yang kompeten	120	Jumlah	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat/bimbingan teknis
		Meningkatnya kapasitas dan dukungan manajemen penelitian dan pengembangan perhubungan	4	Tingkat maturitas SPIP	3	Level	menggunakan instrumen oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal
			5	Tingkat penyerapan anggaran Badan Litbang Perhubungan	92	%	Jumlah anggaran yang terserap pada tahun berjalan : Jumlah total anggaran pada tahun berjalan

LAMPIRAN IV

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	KETERANGAN	
					2019		
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian, melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi antarmoda	1	Prosentase penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pada transportasi antarmoda	%	80	Jumlah Penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan: Jumlah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Transportasi Antarmoda
		Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi antarmoda	2	Jumlah kebijakan internal yang dihasilkan di Pusat Litbang Transportasi Antarmoda	Jumlah	2	Jumlah kebijakan internal yang telah disusun
		Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi antarmoda	3	Prosentase implementasi hasil penelitian pada (t-2) pada transportasi antarmoda, t adalah tahun IKU	%	80	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2): Jumlah penelitian pada (t-2)
		Tersedianya SDM Pusat Litbang Transportasi Antarmoda yang kompeten	4	Jumlah SDM Puslitbang Transportasi Antarmoda yang kompeten	Jumlah	20	Jumlah pegawai Puslitbang Transportasi Antarmoda yang memiliki sertifikat diklat/bimbingan teknis di bidang transportasi antarmoda
			5	Tingkat produktivitas peneliti	Index	2	Jumlah penelitian yang dihasilkan: Jumlah total peneliti
		Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda	6	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	menggunakan instrumen oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal
			7	Jumlah hasil forum ilmiah yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan	Jumlah	4	jumlah hasil forum ilmiah yang menjadi rekomendasi kebijakan, dibuktikan dengan nota dinas kepada Kepala Badan litbang atau surat kepada Menteri Perhubungan/stakeholders terkait

LAMPIRAN V

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	KETERANGAN
						2019	
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian, melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi jalan dan perkeretaapian	1	Prosentase penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pada transportasi jalan dan perkeretaapian	%	80	Jumlah Penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan : Jumlah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
		Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi jalan dan perkeretaapian	2	Jumlah kebijakan internal Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian yang dihasilkan	Jumlah	10	Jumlah kebijakan internal yang telah disusun
		Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi jalan dan perkeretaapian	3	Prosentase implementasi hasil penelitian pada (t-2) pada transportasi jalan dan perkeretaapian, t adalah tahun IKU	%	80	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2) : Jumlah penelitian pada (t-2)
		Tersedianya SDM Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian yang memiliki kemampuan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian	4	Jumlah SDM Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian yang kompeten	Jumlah	15	Jumlah pegawai Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian yang memiliki sertifikat bimbingan/diklat teknis di bidang transportasi Jalan dan Perkeretaapian
			5	Tingkat produktivitas peneliti	Index	1,5	Jumlah penelitian yang dihasilkan : Jumlah total peneliti
		Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian	6	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	menggunakan instrumen oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal
			7	Jumlah hasil forum ilmiah yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan	Jumlah	6	jumlah hasil forum ilmiah yang menjadi rekomendasi kebijakan

LAMPIRAN VI

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	KETERANGAN
						2019	
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian, melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan	1	Prosentase penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pada transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan	%	80	Jumlah Penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan : Jumlah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan	2	Jumlah kebijakan internal Pusat Litbang Transportasi yang dihasilkan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah	3	Jumlah kebijakan internal yang telah disusun
		Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi laut, sungai, danau dan Penyeberangan	3	Prosentase implementasi hasil penelitian pada (t-2) pada transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, t adalah tahun IKU	%	80	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2) : Jumlah penelitian pada (t-2)
		Tersedianya SDM Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang memiliki kemampuan di bidang transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan	4	Jumlah SDM Puslitbang Transportasi LSDP yang kompeten	Jumlah	25	Jumlah pegawai Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang memiliki sertifikat bimbingan/diklat teknis di bidang transportasi LSDP
			5	Tingkat produktivitas peneliti	Index	1,5	Jumlah penelitian yang dihasilkan : Jumlah total peneliti
		Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi LSDP	6	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	menggunakan instrumen oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal
			7	Jumlah hasil forum ilmiah yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan	Jumlah	5	jumlah hasil forum ilmiah yang menjadi rekomendasi kebijakan

LAMPIRAN VII

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	KETERANGAN
						2019	
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi untuk mewujudkan pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian, melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi udara	1	Prosentase penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan pada transportasi udara	%	80	Jumlah Penelitian yang dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan : Jumlah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Transportasi Udara
		Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi udara	2	Jumlah kebijakan internal Pusat Litbang Transportasi Udara yang dihasilkan	Jumlah	5	Jumlah kebijakan internal yang telah disusun
		Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan transportasi udara	3	Prosentase implementasi hasil penelitian pada (t-2) pada transportasi udara, t adalah tahun IKU	%	80	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian pada (t-2) : Jumlah penelitian pada (t-2)
		Tersedianya SDM Pusat Litbang Transportasi Udara yang memiliki kemampuan di bidang transportasi udara	4	Jumlah SDM Puslitbang Transportasi Udara yang kompeten	Jumlah	20	Jumlah pegawai Puslitbang Transportasi Udara yang memiliki sertifikat bimbingan/diklat teknis di bidang transportasi udara
			5	Tingkat produktivitas peneliti	Index	1,5	Jumlah penelitian yang dihasilkan : Jumlah total peneliti
		Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara	6	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	menggunakan instrumen oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal
			7	Jumlah hasil forum ilmiah yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan	Jumlah	4	jumlah hasil forum ilmiah yang menjadi rekomendasi kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010-2013.
- Kementerian Perhubungan, *Konsep Review Sistem Transportasi Nasional*, Jakarta, 2013.
- Kementerian Perhubungan, *Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 (Draft)*, Jakarta, 2014.
- Kementerian Perhubungan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan 2005-2025*, 2008.
- Departemen Perhubungan, *Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan*, Jakarta, 2006.
- Departemen Perhubungan, *Peraturan MenHub No.KM 31/2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan*
- Departemen Perhubungan, *Rencana Strategis Departemen Perhubungan 2005-2009*
- Departemen Perhubungan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan(KM No. 24, 2001), 2001
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA-KL) 2010-2014*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 1: Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 2: Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 3: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Panjang (KPJM)*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 4: Format Baru Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)*. 2009.
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 5: Jadwal Pelaksanaan Penerapan dan Penutup*. 2009.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama*. 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi*. 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan*. 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah*. 2008.

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. *Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*. 2009.

Sekretariat Negara, *Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009*, Jakarta, 2005.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Paparan Direktur Transportasi pada *Focus Group Discussion (FGD) Renstra Kementerian Perhubungan: Perkembangan Kondisi Infrastruktur dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Transportasi*, Jakarta, 10 November 2014

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,